



Demokrasi, Buddhayana, dan Pemberdayaan Dharmaduta

Krishnanda Wijaya-Mukti

**DEMOKRASI, BUDDHAYANA,
DAN PEMBERDAYAAN DHARMADUTA**

DEMOKRASI, BUDDHAYANA, DAN PEMBERDAYAAN DHARMADUTA

Krishnanda Wijaya-Mukti

**Mengenang 10 Tahun
Wafatnya Penulis.**

Jakarta, 6 Maret 2026



KARANIYA



*Setelah terlahir di Alam Bahagia
(Sukhawati),
mereka akan dapat tinggal dan menjadi
sangat dekat
dengan begitu banyak orang yang
berkebajikan tinggi.
(Sutra Amitabha)*

Pahala kebajikan dari penerbitan buku ini
kami limpahkan untuk
Alm. dr. Krishnanda Wijaya-Mukti, M.Sc.
(Maha Upasaka Pandita Dharmachandra)

Semoga Almarhum terlahir di Alam
Bahagia, memiliki berkah-berkah
tertinggi untuk dapat selalu mendengar,
mempraktikkan, dan merealisasi Dharma.



Daftar Isi

1. Pengabdian Dharma Dokter
Krishnanda Wijaya-Mukti 7
2. Demokrasi dan Agama Buddha
di Indonesia 14
*Disampaikan dalam Seminar
Dies Natalis ke-42
Sekolah Tinggi Filsafat
Driyarkara, 26 Februari 2011.*
3. Buddhayana, Tinjauan
Skolastik 86
*Disampaikan dalam Lokakarya
Buddhayana di Jakarta,
10 September 2000.*

4. Pemberdayaan Dharmaduta
dalam Pembangunan
Berbasis Komunitas..... 109

*Orasi Ilmiah yang
disampaikan pada Acara
Wisuda Sekolah Tinggi
Agama Buddha (STAB)
Bodhi Dharma Medan, 23
Desember 2006.*

Pengabdian Dharma Dokter Krishnanda Wijaya-Mukti



Dokter Krishnanda Wijaya-Mukti (Maha Upasaka Pandita Dharmachandra) dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 17 Maret 1950. Pak Krish, begitu beliau disapa, sejak muda telah aktif di Wihara Dharmaratna Sukabumi. Ketika menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, beliau ikut mendirikan dan pernah menjadi ketua Keluarga Mahasiswa Buddhis Jakarta (KMBJ). Beliau kemudian juga membimbing kelanjutan dari KMBJ, yaitu Hikmabudhi (Himpunan Mahasiswa Buddhis

Indonesia), pergerakan mahasiswa berspiritkan Buddhadharma yang tidak menjauh dari isu-isu sosial kebangsaan.

Perjuangan Pak Krish dalam meningkatkan kualitas generasi muda sangat nyata, antara lain dilakukan melalui Yayasan Pendidikan Buddhis Tri Ratna yang mengelola Sekolah Tri Ratna dan Yayasan Dharma Pembangunan yang mengelola Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan. Beliau juga menyediakan asrama di rumah yang menjadi tempat praktik beliau sebagai dokter dan di rumah sebelah rumah tempat tinggal beliau, sehingga beliau senantiasa dapat memantau dan membimbing anak-anak asuhnya. Beliau juga mendirikan dan menjadi ketua yang pertama Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis (BKPB).

Sebagai cendekiawan Buddhis, Pak Krish bukan hanya berbagi Dharma melalui khotbah-khotbahnya di berbagai wihara, tetapi juga menjadi dosen, pembicara di forum-forum lintas agama, pengisi mimbar agama Buddha di koran, serta penulis dan editor buku-buku Dharma. Bukunya yang paling terkenal adalah *Wacana Buddha Dharma*. Beliau juga sempat mengabdikan diri sebagai Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1991 sampai tahun 1996.

Sesuai dengan semangat non-sektarian yang dianutnya, Pak Krish kemudian aktif di Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) dan menjadi ketua Pusdiklat Agama Buddha Indonesia. Beliau aktif sebagai penatar para duta Dharma di seluruh Indonesia. Orang-orang yang mengenal beliau, selain kagum akan pengetahuan Dharma

beliau yang begitu luas, juga sangat terkesan atas ketulusan hati beliau dalam berbagi Dharma. Beliau tidak pelit, selalu dengan senang hati membagikan apa pun yang beliau punya.

Pemikiran dan kajian beliau yang sangat progresif dalam mengembangkan agama Buddha terapan akhirnya banyak tersalurkan di Wihara Ekayana Arama - Indonesia Buddhist Centre, Jakarta Barat. Di tempat inilah beliau menemukan komunitasnya. Selain menjadi ketua Pusdiklat ABI, beliau juga menjadi ketua Korps Pandita dan Upacarika Wihara Ekayana Arama serta pengawas Yayasan Karaniya. Secara rutin beliau mengisi *Dharma Class*, khotbah Dharma, dan kursus-kursus Dharma. Terdapat 16 judul buku Dharma terbitan Yayasan Karaniya yang merupakan suntingan beliau.

Dokter Krishnanda Wijaya-Mukti wafat dalam usia 67 tahun di Rumah Sakit Evasari, Jakarta pada hari Minggu, 6 Maret 2016 pukul 01.37 WIB. Umat Buddha Indonesia kehilangan salah seorang teladan dan pejuang Dharma yang gigih. Pak Krish merupakan sosok idealis, kritis, dan konsisten terhadap cita-cita yang diperjuangkan, sesuatu yang sulit ditemukan pada tokoh Buddhis lainnya.

Menjelang kremasi jenazah beliau, Upasika Pandita Juniarti Salim yang pernah menjadi staf beliau di Pusdiklat Agama Buddha Indonesia menuliskan puisi yang dengan tepat menggambarkan sosok beliau:

*Telah pergi putra terbaik Buddha
Telah pergi putra terbaik Dharma
Telah pergi putra terbaik Sanggha
Orang mengenalmu
dengan tubuh fisik yang mungil*

*Tapi semua orang
akan mengingatmu
dengan semangat dan inspirasi
besar*

*Kukuh pada kebenaran
berbagi dan memberi esensi
ajaran
Itulah yang engkau lakukan
di sepanjang hidupmu
Prinsipmu, A ya A, B ya B
tidak ada kompromi*

*Engkau tunjukkan sebuah teladan
saat penyakit datang
menghampiri
engkau menghadapinya dengan
gagah
penyakit dan rasa sakit tidak
mampu
membuatmu lemah dan menyerah*

*Saat tubuh terbujur
Saat kematian datang menjemput
engkau tetap memberi kami
sebuah pelajaran berharga
Betapa seorang manusia*

*dapat begitu disayangi dan
dicintai
oleh begitu banyak orang*

*Saat ini,
dengan namaskara mendalam
dan rasa terima kasih
kami semua melepasmu
dengan senyum dan gembira
Karena kami tahu
kami tidak pernah menyesal
pernah mengenalmu
Selamat jalan guru kami...
Selamat jalan pejuang Dharma...*

Demokrasi dan Agama Buddha Di Indonesia

Krishnanda Wijaya-Mukti

Pendahuluan

Agama Buddha ikut mengantarkan Sriwijaya dan Majapahit mencapai kejayaan. Majapahit, negara kesatuan sebelum kolonialisme Belanda, kadang dijadikan acuan politis batas NKRI saat ini. Beberapa atribut kenegaraan diambil dari elemen-elemen Majapahit. "Sang Merah Putih" berasal dari panji Majapahit. "*Bhinneka Tunggal Ika*" berasal dari *Kakawin Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular, pujangga Majapahit.

Istilah Pancasila diambil dari *Panca Sila* agama Buddha. Soekarno menyatakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara digali dari khazanah budaya bangsa sejak dahulu kala. Prinsip demokrasi dirumuskan sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini tidak berdiri sendiri. Kerakyatan terkait dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.

Pendekatan demokratis berupa musyawarah yang mempersatukan, demi kepentingan dan kesejahteraan orang banyak, tidak asing bagi masyarakat Buddhis. Tetapi sistem demokrasi berupa pemerintahan rakyat, dengan kedaulatan di tangan rakyat, dan pembagian kekuasaan semacam *trias politica*, memang baru dikenal pada zaman modern.

Sriwijaya merupakan pusat pengajaran agama Buddha. Raja mendukung agama dan mendapat legitimasi agama, namun tidak ada keterangan apakah pemerintahannya menjalankan pendekatan yang demokratis berdasar ajaran Buddha. Banyak yang belum diketahui mengenai ketatanegaraan Sriwijaya. Sedangkan sistem pemerintahan Majapahit paling tidak dapat diketahui dari Kitab Nagarakretagama dan sejumlah piagam.

Ada patih atau perdana menteri yang ikut bersama-sama raja melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Untuk mengambil keputusan yang penting raja mengadakan musyawarah dengan Dewan Pertimbangan Agung. Para birokrat berbagai jenjang diangkat langsung oleh penguasa berdasar kekerabatan atau keturunan. Tetapi di tingkat terbawah dikenal

rembug desa dan rakyat yang memilih kepala desanya.

Konsep dewa-raja mengharuskan rakyat tunduk pada kehendak raja. Namun raja mengikuti hukum berupa undang-undang. Kitabnya disebut *Kutara Manawa* yang sangat dipengaruhi agama Hindu. Selain dewan menteri yang melaksanakan pemerintahan, ada pejabat-pejabat hukum keagamaan, terdiri dari unsur Siwa *Dharmadhyaksa Kasaiwan* dan unsur Buddha *Dharmadhyaksa Kasogatan*.

Kelahiran Kembali

Dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit (1429), agama Buddha lambat-laun mulai dilupakan. Tidak ada pengakuan terhadap agama Buddha di zaman penjajahan. Secara sporadis ada komunitas yang mewarisi tradisi Siwa-Buddha, khususnya di Tengger dan Bali. Pendetang

Tionghoa mendirikan klenteng di mana-mana, yang tertua mungkin Klenteng Jin-de Yuan di Batavia (1650). Belakangan Perkumpulan Teosofi (1883) ikut memperkenalkan ajaran Buddha. Lahirnya kembali kelembagaan agama Buddha di Indonesia berakar dari tiga kelompok masyarakat itu.

Organisasi Buddhis yang pertama di Jawa (1929) dengan media cetak berbahasa Belanda dipimpin oleh Ernest Erle Power dan Josias van Dienst. Penggantinya Kwee Tek Hoay, yang menerbitkan *Moestika Dharma* (1932) memperkenalkan agama Buddha dalam bahasa Melayu. Ia mendirikan organisasi *Sam Kauw Hwee*, di kemudian hari disebut Tridharma, yang menganut tiga ajaran, yaitu Buddhisme, Taoisme dan Konfusianisme. Minat untuk kembali ke agama Buddha bertambah setelah kedatangan

Biksu Narada dari Sri Lanka (1934) di beberapa kota di Jawa.

Agama Buddha bangkit seiring dengan perjuangan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Untuk pertama kalinya pada tahun 1953 diselenggarakan upacara Waisak nasional di Borobudur. Walau pemerintah belum secara formal mengakui keberadaan agama Buddha, peristiwa yang diikuti oleh lebih dari tiga ribu peserta itu dihadiri beberapa duta besar mancanegara. Pengagasnya Tee Boan An. Ia menjabat ketua umum Gabungan Sam Kauw Indonesia (GSKI) merangkap wakil ketua Perhimpunan Pemuda Teosofi Indonesia. GSKI merupakan gabungan dari Sam Kauw Hwee dan Thian Li Hwee yang selanjutnya diikuti Bagian Kebaktian Sin Ming Hui (Perkumpulan Sosial Candra Naya sekarang) dan Buddha Tengger.

Tee Boan An menjadi samanera menurut tradisi Mahayana (*Chan*), dan ditahbiskan menjadi biksu Therawada di Myanmar dengan nama Ashin Jinarakkhita. Jinarakkhita merupakan biksu putra Indonesia pertama di abad ke-20. Setelah kembali ke Indonesia (1955), ia mengadakan perjalanan ke seluruh pelosok tanah air. Ajaran yang dikembangkannya non-sektarian. Ia mendirikan organisasi Buddhis nasional yang pertama, Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia (PUUI), dengan anggota yang telah diinisiasi (1955). PUUI beberapa kali berganti nama, menjadi Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia, lalu Majelis Upasaka-pandita Agama Buddha Indonesia (MUABI), dan yang terakhir Majelis Buddhayana Indonesia (MBI). Dibentuk pula organisasi umat awam, Persatuan Buddhis Indonesia (1957), yang belakangan dinamakan

Perhimpunan Buddhis Indonesia (Perbudhi).

Agama Buddha menjaga jarak terhadap politik. Sampai di akhir era demokrasi parlementer, umat Buddha dan organisasinya bersatu dengan solid, tidak terganggu oleh situasi politik liberal yang labil dan menghadapi ancaman separatis. Agaknya ketika itu kegiatan keagamaan Buddha di Indonesia praktis ada di dalam lingkup pengaruh figur Jinarakkhita.

Era Demokrasi Terpimpin

Menghadapi konsep Nasakom di era Demokrasi Terpimpin sikap umat Buddha terhadap politik mendua. Ada yang menjauh, ada yang mendekat. Karena tidak ada tempatnya dalam partai agama, kalau bukan nasionalis, tentu dekat dengan komunis, namun tidak menjadi anggota partai, melainkan terhubung secara tidak

langsung melalui organisasi *onderbouw*, khususnya Baperki bagi warga Tionghoa.

Warga Tionghoa ikut berpolitik sejak pergerakan nasional. Tanpa membedakan agamanya, setelah kemerdekaan, ada yang masuk dalam parlemen/DPR dan MPR, maupun kabinet. Namun berulang kali terjadi huru-hara anti-Cina. Timbul pro dan kontra mengenai asimilasi dan integrasi. Situasi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan agama Buddha karena citra bahwa agama Buddha itu agama Tionghoa begitu kuat.

Di Tiongkok agama Buddha yang berasal dari India secara harmonis hidup berdampingan dengan budaya setempat. Umat Buddha tidak mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari satu peradaban tunggal Buddhis. Mereka tampil dengan identitas

lokal, tercermin pada gambar/patung Buddha yang beragam disesuaikan dengan citra etnis si penganut. Ada Buddha dengan wajah India, Tionghoa, Tibet, Thailand, Jepang. Figur Buddha di Indonesia sendiri bisa dilihat pada versi Buddha di Candi Borobudur. Menjadi Buddhis bukan menjadi orang India. Bagi warga Tionghoa, dapat dikatakan Buddha telah di-Tionghoa-kan.

Menurut M.A. Lathouwers, Jinarakkhita menekankan perlunya mengembangkan agama Buddha Indonesia yang khas, suatu bentuk asli yang sesuai dengan alam Indonesia, suatu wadah yang tetap bersumber pada sejarah agama Buddha di masa lampau yang kaya raya, akan tetapi tidak terikat atau dihambat selama perkembangannya. Kesempatan istimewa ini dihubungkan dengan "*Bhinneka Tunggal Ika*". Jakob Oetama pernah mempublikasikan (1963)

pendapat Ashin Jinarakkhita bahwa jiwa toleransi bangsa Indonesia tercermin pada Pancasila. Apabila Pancasila sungguh-sungguh diamalkan, maka dapat memberikan *lichtpunt*, sinar terang kepada dunia.

Jinarakkhita setelah tua berjenggot, sebagaimana penampilan sebagian biksu dari tradisi Tionghoa Mahayana. Walau terjadi kontroversi, ia menggabungkan tradisi Tionghoa, India (Hindu), dan lokal. Praktik pemujaan Eyang Suryakencana dan upacara mandi air tujuh pancuran di malam Jumat Kliwon di Lembah Cipendawa menunjukkan kedekatannya dengan penghayat kepercayaan dan penganut Kejawen. Selain Tripitaka Pali, Sanskerta, Mandarin, karya peninggalan zaman Majapahit *Sanghyang Kamahayanikan* dipandang sebagai bagian dari Tripitaka berbahasa Kawi. Pemerintah

menganugerahkan Bintang Mahaputra Utama kepada tokoh ini (2005) setelah tiga tahun ia meninggal dunia.

Pasca G-30-S

Peristiwa G-30-S menyebabkan banyak orang yang dicurigai mendukung komunis terbunuh dan dipenjara. Orang Tionghoa yang termasuk penganut agama Buddha menjadi sasaran aksi-aksi anti-Cina. Tetapi jumlah umat Buddha meningkat cepat karena setiap orang diharuskan untuk memeluk salah satu agama. Sekolah-sekolah wajib memberi pendidikan agama. Belakangan, ketertinggalan dalam penyediaan tenaga guru dan sekolah Buddhis, membuat umat tradisional mengikuti pendidikan agama lain sehingga banyak yang pindah agama.

Sebagian penganut agama KTP tidak tahu apa itu ajaran Buddha. Sebaliknya tidak jarang orang yang aktif dalam kegiatan Buddhis, namun sekaligus memiliki KTP dengan agama lain. Supaya tidak serta-merta dicap Tionghoa, ada yang lebih suka tidak mencantumkan agama Buddha dalam KTP-nya. Mungkin agar lebih mudah mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Diskriminasi merupakan fakta. KTP bagi keturunan Tionghoa diberi kode tertentu. Bahkan beberapa orang pribumi yang mengaku beragama Buddha, dianggap sebagai orang Tionghoa dan ikut dipersulit ketika mengurus akta perkawinan.

Warga Tionghoa dianggap sebagai minoritas asing yang dibedakan dari minoritas suku-suku pribumi. Pemerintah menghendaki minoritas Tionghoa berasimilasi. Mereka diminta untuk ganti nama. Bahasa dan

aksara Tionghoa dilarang. Film-film berbahasa Mandarin dibatasi. Namun pertimbangan ekonomi ternyata lebih kuat daripada prinsip asimilasi (Leo Suryadinata, 1984). Inpres No. 14/1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, membatasi pelaksanaan tata-cara ibadah Cina. Perayaan agama dan adat istiadat Cina tidak boleh dilakukan di depan umum. Sementara itu, pengakuan terhadap agama minoritas, yaitu Buddha dan terlebih Konghucu tidak sejalan dengan kebijaksanaan asimilasi.

Aliran Mahayana yang terkait erat dengan ke-Tionghoa-an dan pemakaian bahasa Mandarin jelas menghadapi tekanan, sedangkan aliran Therawada menjadi lebih disukai. Untuk memberi perlindungan, muncul Dewan Wihara Indonesia (Dewi) yang diketuai oleh Letkol. Suraji Ariakertawijaya, sekjen Perbudhi. Kebanyakan klinteng ganti nama

menjadi wihara, kecuali klenteng non-Buddhis. Klenteng sebenarnya merupakan wihara Mahayana yang berafinitas kultural Tionghoa. Menurut Cl. Salmon dan D. Lombard (1985) asal kata klenteng adalah *Guan-yin Ting*. Adapun Guan-yin dalam bahasa Sanskerta *Awalokiteswara*, salah satu personifikasi Bakal Buddha.

Dari Organisasi ke Organisasi

Untuk menyalurkan aspirasi politik, Federasi Umat Buddha Indonesia menjadi anggota Sekretariat Bersama Golongan Karya (1967). Anggotanya: Buddhis Indonesia, Gabungan Tridharma, Musyawarah Umat Buddha Seluruh Indonesia, Agama Hindu Buddha Tengger dan Agama Buddha Wisnu Indonesia. Di luar itu, PUUI, Perbudhi, dan Maha Sangha Indonesia membentuk Majelis Tertinggi Seluruh Umat Buddha Indonesia

(1969). Sebagian biksu Therawada (di antaranya kemudian melepaskan jubah) memisahkan diri, membentuk Sangha Indonesia (1972).

Konflik organisasi berulang kali terjadi, entah karena ambisi pribadi atau penganutan agama yang tidak sungguh-sungguh dipraktikkan, atau terdorong oleh semangat sektarian dan pengaruh asing. Sekjen Golkar (Brigjen Saparjo) mengambil prakarsa untuk mempersatukan (1972). Tiga tahun kemudian muncul wadah tunggal Buddha Dharma Indonesia (Budhi). Namun Gabungan Tridharma Indonesia (GTI) dan MUABI tidak sampai ikut fusi. Gantinya Perbudhi muncul Gabungan Umat Buddha Seluruh Indonesia (GUBSI) yang dibentuk dengan bantuan DPP Golkar dan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha (1976).

Di pihak lain muncul majelis-majelis sektarian. Seorang pejabat di Ditjen Bimas Hindu dan Buddha mendirikan Majelis Dharmaduta Kasogatan (1975). Ia juga ikut membidani lahirnya Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (1975) yang berinduk di Taiwan. Bagian kerohanian dari Budhi berubah menjadi Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia (1976), sekarang dinamakan Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi). Organisasi lainnya adalah Majelis Rohaniwan Tridharma se-Indonesia (1977), Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (1978), dan Nichiren Soshu Indonesia (1964) yang berinduk di Jepang kemudian menjadi Majelis Agama Buddha Nichiren Soshu Indonesia (NSI).

Dirjen Bimas Hindu dan Buddha (Gde Puja MA) memfasilitasi organisasi sanggha hingga bersatu kembali dan

memberinya nama Sangha Agung Indonesia disingkat Sagin (1974). Tetapi tak lama kemudian beberapa biksu kembali memisahkan diri membentuk Sangha Theravada Indonesia (1976). Dua tahun berikutnya, muncul Sangha Mahayana Indonesia. Sejak itu terdapat tiga organisasi biksu. Ketiga sanggha kemudian bersama-sama tujuh majelis mendirikan Walubi, Perwalian Umat Buddha Indonesia (1979).

Golkar sebagai kendaraan politik pemerintah Orde Baru mengambil simpati warga Tionghoa yang telah mengalami trauma dalam kegiatan berpolitik. Dukungan suara dan finansial warga Tionghoa ketika Pemilu tentu sangat berarti. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional warga Tionghoa punya ruang gerak dalam dunia bisnis, sekalipun masih menghadapi diskriminasi. Bidang pekerjaan

lain sulit dimasuki, apalagi menjadi pegawai negeri dan anggota ABRI. Untuk menjaga stabilitas politik, pemerintah juga mengawasi organisasi yang anggotanya banyak dari warga Tionghoa. Organisasi-organisasi Buddhis bukan hanya dibina lewat Departemen Agama RI tetapi juga mendapatkan pendampingan dari BAKIN dan Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC).

Wadah Tunggal

Dalam birokrasi pemerintahan, agama Buddha mendapatkan tempat ketika Biro Urusan Hindu Bali di Kementerian Agama RI ditingkatkan statusnya menjadi Ditjen Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali dan Buddha (1966). Setelah menjadi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha (1969) ada sebuah direktorat mengurus agama Buddha yang digabung dengan Hindu. Lebih dari sepuluh tahun

kemudian baru urusan agama Buddha dipisahkan dari Hindu, masing-masing memiliki direktorat sendiri (1980).

Pemerintah mengarahkan terselenggaranya Kongres Umat Buddha Indonesia di Yogyakarta (1979) untuk melahirkan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi). Nama ini pemberian Menteri Agama (Alamsyah Ratu Prawiranegara), yang menghendaki adanya satu organisasi mewakili umat Buddha dalam Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (1980). Walubi memiliki organ Persidangan Sangha-Sangha sebagai lembaga fatwa dengan ketuanya Biksu Ashin Jinarakkhita.

Kongres tersebut mengukuhkan hasil Lokakarya Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional Indonesia. Keputusannya antara lain mengenai kriteria

agama Buddha di Indonesia. Kriteria menjadi penting untuk menyaring aliran yang menumpang hidup memakai nama agama Buddha tetapi tidak berpedoman pada Kitab Suci Tripitaka. Kongres juga menyetujui kode etik menyatakan tekad untuk melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, padahal sebenarnya Pancasila adalah asas bersama.

Ketika Waisak menjadi hari libur nasional (1983), ketua NSI selaku Sekjen Walubi, menyatakan bahwa Waisak adalah Hari Balas Budi. Nichiren diakui sebagai Buddha zaman sekarang, menggantikan Buddha Gotama. Kongres I Walubi (1986) selain mengganti pengurus, juga menetapkan bahwa NSI tidak memenuhi kriteria agama Buddha, dan melanggar kode etik. NSI dikeluarkan dari Walubi (1987).

Pemerintah tidak mencampuri masalah ini dan tetap mengakui eksistensi NSI.

Pemuda Buddhis Indonesia (Pembudi) yang lahir dari lingkungan MUABI (1973) ikut menandatangani Pernyataan Pemuda Indonesia 1986, dan mempersiapkan Kongres Pemuda Buddhis. Pemerintah ikut mengarahkannya dengan mengikutsertakan unsur pemuda majelis-majelis Walubi, melahirkan organisasi Generasi Muda Buddhis Indonesia disingkat Gemabudhi (1986). Begitu pula kelompok wanita dari majelis-majelis Walubi diarahkan untuk membentuk wadah tunggal dengan nama Keluarga Besar Wanita Buddhis Indonesia. Hanya mahasiswa yang mendirikan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (1988) bebas dari campur tangan pemerintah. Sementara itu, dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun

1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beberapa organisasi Buddhis yang pernah dikenal sebelumnya bubar.

Kasus Tragedi Walubi

Konflik organisasi Buddhis kembali terjadi setelah Munas II Walubi (1992). Biksu Girirakkhito menjadi ketua umum dan sekjennya Budi Setiawan, Direktur Urusan Agama Buddha yang juga adalah polisi. Seorang konglomerat, Dra Siti Hartati Murdaya, menjadi ketua Dewan Penyantun. Peran Widyeka Sabha yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap DPP ditiadakan, sehingga kekuasaan mutlak ada di tangan ketua umum dan sekjen. Terjadi rekayasa sidang paripurna untuk menetapkan AD/ART baru, yang dihadiri oleh pejabat pemerintah yang jumlahnya hampir sama dengan peserta sidang. Rapat-rapat Walubi biasa dihadiri aparat

keamanan yang tidak sedikit jumlahnya. Walubi tampak berubah, seperti dikatakan Hartati, "Dulu Walubi hanya mengenal dharma agama yang urusannya vertikal, sekarang ada dharma negara yang urusannya horisontal" (*Suar* 168, /9/1999).

Selisih pendapat berlanjut dengan laporan Walubi ke aparat keamanan tentang penyebaran AD/ART palsu. Kittinanda, ketua Panitia Munas yang juga salah satu ketua DPP, dicitrak dan diinterogasi di sebuah markas militer (18/7/1994). Ia dipaksa mengakui bersalah. Orang yang kedua yang dicitrak, Pramana Winardi, sekretaris Badan Perumus AD/ART yang juga wakil sekjen DPP. Mereka berdua berasal dari Majelis Tridharma. Yang ketiga, Tjoetjoe Alihartono, ketua MBI yang menjadi ketua Badan Perumus AD/ART, juga salah satu ketua DPP Walubi. Karena tuduhan tidak terbukti,

Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3. Namun atas laporan DPP Walubi kepada Bakorstanasda Jaya, mereka bertiga dicituk lagi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara kekerasan, berupa pemukulan dan penyetruman listrik.

Ester Indahyani Jusuf mempertanyakan bagaimana terdapat konspirasi antara Walubi dengan militer. Teror terhadap orang-orang yang berseberangan dengan Walubi, penangkapan dan penyiksaan tokoh-tokoh Buddhis jelas bukan pekerjaan penduduk sipil biasa atau dalam kapasitas yang mungkin dilakukan Walubi secara legal (*Glodok Standard*, 13/7/1999). Penyiksaan terhadap ketiga tokoh itu, diadukan ke Komnas HAM. Walubi meresponsnya sebagai hal yang memermalukan aparat keamanan di mata dunia internasional.

Sagin dan MBI diberhentikan dari keanggotaan Walubi dengan alasan karena melanggar disiplin organisasi (15/10/1994). Mereka juga dituduh sesat, menganut sinkretisme besar (Sai Baba) dan sinkretisme kecil (merangkul semua sekte), memecahbelah umat, serta menghidupkan adat Cina. Pada hari yang sama Dirjen Bimas Hindu dan Buddha menerbitkan surat agar seluruh jajaran Departemen Agama mendukung keputusan Walubi tersebut. Sagin dan MBI tidak lagi dibina oleh Departemen Agama. Isu menghidupkan adat Cina membuat berbagai instansi pemerintah lintas sektoral menekan Sagin dan MBI. Kedua organisasi ini mengajukan gugatan lewat PTUN, yang memerintahkan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha serta Walubi untuk menanggukkan pemberhentian Sagin dan MBI dari Walubi. Tetapi keadaan tidak berubah.

Peringatan HUT ke-73 Bिक्षu Ashin Jinarakkhita digagalkan oleh aparat keamanan berdasar laporan Walubi bahwa bahwa umat Buddha keturunan Tionghoa mau berdemonstrasi menentang pemerintah. Padahal dalam acara itu banyak sekali umat pribumi yang datang dari daerah-daerah. Walubi dan aparat Departemen Agama berusaha memaksa umat dan wihara binaan Sagin dan MBI untuk pindah ke organisasi lain. Penggalangan dilakukan oleh oknum-oknum militer. Namun umat Buddha tidak terpengaruh oleh bujuk rayu maupun intimidasi tersebut. Direktur Urusan Agama Buddha menawarkan Sagin dan MBI ganti nama, mengganti kepengurusan, atau membentuk yayasan terpisah dari Sagin dan MBI. Karena masih membangkang, mereka dinyatakan sebagai aliran kepercayaan, bukan agama.

Kembalikan Agama pada Pemeluknya

Dengan jatuhnya Orde Baru, reformasi seperti menyadarkan Walubi, sehingga menerima kembali Sagin dan MBI (3/11/1998), sekaligus mengembalikan citra dan nama baiknya. Dalam Munas (6/11/1998), DPP Walubi menyebutkan penyesalan atas segala persoalan masa lalu, namun Sagin dan MBI sendiri tidak diikutsertakan sebagai peserta Munas. Ternyata lewat Munas Khusus tersebut Walubi membubarkan diri. Mengapa? Memang ada desakan berbagai kalangan, namun kelihatannya ada alasan lain. Kalau Walubi masih dipertahankan, DPP Walubi dan Hartati harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu.

Setelah Walubi bubar, ketiga sanggha, organisasi para biksu,

mendirikan Konferensi Sangha Agung Indonesia, disingkat KASI (14/11/1998). KASI didukung oleh MBI, majelis-majelis Tridharma, Therawada, dan Mahayana. Prinsip-prinsip dasar pendirian KASI antara lain demokratis, tidak otoriter, mengakui pluralisme, kebersamaan dalam kesetaraan dan kesamaan martabat, kepemimpinan yang berorientasi pada fungsi dan tujuan lembaga.

Organisasi-organisasi umat awam di luar binaan sangha-biksu mendirikan Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dengan singkatan Walubi dan ketua umumnya Hartati Murdaya (30/12/1998). Pemakaian singkatan nama Walubi ini membuat masyarakat menganggapnya sama seperti Walubi-lama yang telah dibubarkan. Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Mayjen TNI (Purn.) I Wayan Gunawan mengeluarkan surat agar untuk dapat dilayani

oleh Departemen Agama, Sagin dan MBI harus mendapatkan rekomendasi dari Walubi. Tujuannya memaksa Sagin dan MBI bergabung dengan Walubi-baru. Departemen Agama memperlakukan Walubi-baru sama seperti Walubi yang sudah dibubarkan, sehingga Walubi-baru, bukan KASI, yang mewakili umat Buddha duduk sejajar dengan MUI, KWI, PGI, dan PHDI.

Namun dalam pertemuan dengan KASI dan majelis-majelis agama Buddha (17/12/1999), Menteri Agama, Malik Fadjar, menegaskan bahwa Departemen Agama akan melayani semua organisasi Buddhis tanpa pandang bulu karena semua adalah mitra pemerintah. Ia mengatakan "Kembalikan Agama pada Pemeluknya". Wadah tunggal bukan lagi keharusan. Dirjen Bimas Hindu dan Buddha memang kemudian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada

Kakanwil Departemen Agama seluruh Indonesia untuk membina kembali MBI dan Sagin di luar Walubi.

Kasus Imlek dan Tradisi Tionghoa

Menurut Ester Indahyani Jusuf, kehadiran Walubi diduga sebagai organ bentukan pemerintah dan militer dalam penerapan politik rasial. Organisasi ini menjadi wadah bagi agama Tionghoa. Sepintas peraturan yang dikeluarkan pemerintah menguntungkan pihak Buddha, tetapi jelas merugikan Konghucu. Penyamarataan beragam ajaran menjadi satu agama Buddha membuat tidak jelas yang mana Buddha asli, yang mana bukan (*Glodok Standard*, 13/7/1999).

Dalam rangka pembinaan kehidupan beragama Buddha, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha melayangkan surat kepada Walubi (11/1/1993)

perihal pemberitahuan agar Walubi menyampaikan petunjuk-petunjuk bahwa:

1. Tahun Baru Imlek bukan termasuk salah satu hari raya umat Buddha, karena itu tidak dirayakan di wihara.
2. Tidak mengadakan kegiatan-kegiatan di luar ajaran Buddha yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Walubi merespons dengan menerbitkan surat perihal larangan merayakan Tahun Baru Imlek di wihara. Timbul reaksi keras dari mana-mana, karena surat-surat tersebut ditangkap sebagai pelanggaran sembahyang pada hari raya Imlek. Banyak wihara yang tutup pada hari itu (23/1/1993), dan umat Buddha mendapat tekanan dari aparat pemerintah yang melakukan operasi razia Imlek.

GUBSI menggugat Dirjen Bimas Hindu dan Buddha serta

Walubi ke PTUN. Pemerintah, dalam hal ini Dirjen yang memeluk agama Hindu sudah terlalu jauh mencampuri urusan intern umat Buddha (*Bisnis Indonesia*, 29/1/1993). Peristiwa ini disebut “malapetaka” oleh oleh Ketua Umum Walubi, yang menyampaikan maaf kepada seluruh umat Buddha di Indonesia (*Pos Kota*, 9/2/1993).

Dirjen menjelaskan telah terjadi salah persepsi di kalangan masyarakat. Yang dilarang itu keramaiannya, seperti mengarak barongsai, menggotong toapekong dan bentuk-bentuk atraksi lain (*Merdeka*, 28/1/1993). Beberapa wihara memang merayakan Imlek dalam arti membentuk kepanitiaan dan melakukan pertunjukan-pertunjukan khas Cina. Sesuai dengan Inpres No. 14/1967, masyarakat Cina di Indonesia seyogianya tidak berorientasi ke negara leluhur dengan segala

tradisi dan budaya Cinanya (*Editor* No. 20/Tahun VI, 6/2/1993).

Mereka yang setia pada tradisi leluhur menggunakan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan Buddha sebagai benteng terakhir untuk mempertahankan budaya Tionghoa. Pemerintah Orde Baru memandang perlu melakukan penataan terhadap lembaga keagamaan Buddha dengan membersihkannya dari anasir-anasir adat Tionghoa. Berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2-360 Tahun 1988 tentang Penataan Klenteng, tidak dibenarkan bangunan keagamaan kepercayaan tradisional Cina menggunakan sebutan wihara atau cetya. Wihara dan cetya dilarang memperlihatkan simbol-simbol/budaya Tionghoa.

Keadaan berubah setelah rezim Orde Baru tumbang. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres RI No. 6

Tahun 2000 mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967. Tahun Baru Imlek menjadi hari libur fakultatif di tahun 2001. Berikutnya melalui Keppres RI No. 19 Tahun 2002, Presiden Megawati mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional, berlaku mulai tahun 2003.

Kasus Utusan Golongan MPR

Diakui atau tidak, petinggi Walubi yang oportunistis berusaha menunjukkan bahwa suara umat Buddha mengalir ke salah satu kontestan Pemilu. Menjelang Pemilu 1997 terjadi "kuning-isasi" (kuning adalah warna Partai Golkar, editor) pada perayaan Waisak di Borobudur (*Duta*, 30/4/1999). Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi sejumlah tokoh yang tidak sejalan dengan Walubi mendirikan Partai Buddhis Demokrat Indonesia disingkat Parbudi (16/2/1999). Parbudi

tidak mengikuti pemilihan umum sebagai peserta, melainkan berkoalisi dengan partai lain. Di Jakarta, perjanjian koalisi dilakukan dengan Partai Keadilan dan Persatuan ((21/4/1999). Yang diharapkan, barangkali PKP memberi tempat bagi umat Buddha di antara calon-calon anggota legislatifnya.

Walubi di satu pihak dengan MBI dan KASI di pihak lain terlibat konflik sehubungan dengan pengusulan calon anggota MPR utusan golongan. Pengumuman KPU tentang hasil verifikasi, mencantumkan nama MBI di antara organisasi golongan agama (*Kompas*, 5/8/1999). Namun Walubi berhasil membatalkannya. Dalam perebutan satu kursi itu Walubi mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama. Utusan golongan agama tentu bukan utusan Departemen Agama, karena itu MBI didukung oleh KASI

dan majelis-majelis di luar Walubi yang memosisikan diri sebagai bagian dari perjuangan reformasi dan selama ini tidak tersalurkan aspirasinya (*Media Indonesia*, 14/8/1999).

Demo pendukung MBI di KPU menolak figur yang telah menjungkirbalikkan tata-nilai agama menjadi utusan golongan Buddha. Memakai istilah Gus Dur, seharusnya ulama yang mengatur umat, bukan sebaliknya. Selain dikenal sebagai fungsionaris Golkar, ketua Walubi disebut sebagai bagian dari tim sukses Habibie, yang mengangkatnya menjadi anggota DPA. Demo dibalas dengan demo pendukung Walubi-baru. Terjadi saling gugat karena tokoh yang merasa nama baiknya dicemarkan mengadu ke Polda Metro Jaya (*Detak* 57/II, 24/8/1999). Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Walubi-baru.

Sepanjang era Orde Baru, kebanyakan umat Buddha mendekati ke Golkar, tetapi hanya ada seorang yang berhasil menjadi anggota DPR. Pada Pemilu-Pemilu berikutnya, tidak ada lagi utusan golongan. Beberapa umat Buddha muncul sebagai calon anggota DPD dan DPR atau DPRD yang menyebar di beberapa partai. Di antaranya ada yang tampil dengan kendaraan Partai Kebangkitan Bangsa, walau tidak sampai cukup mendapatkan suara. Yang berhasil menjadi anggota DPR atau DPRD dari Partai Demokrat dan PDI-P.

Kasus Buddha Bar

Demo lain dilakukan belum lama ini untuk menolak Buddha Bar. Bar yang memakai nama dan simbol agama Buddha itu resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta (24/11/2008). Sebagian umat terkecoh karena nama Buddha dikonotasikan terkait dengan

praktik vegetarian, tidak mengonsumsi minuman keras, dan menjauhi hiburan yang tidak senonoh.

Pemerintah yang seharusnya mengayomi kehidupan beragama tidak mengambil inisiatif dan bertindak aktif menyelesaikan kasus yang mengandung unsur penodaan agama ini. Sepertinya tidak benar-benar ada perlindungan negara terhadap agama Buddha. Sepertinya tidak ada yang mewakili umat Buddha di parlemen. Sepertinya umat Buddha bukan bagian penting dari bangsa ini. Atau memang semuanya tidak memiliki keberanian dan tidak berdaya berhadapan dengan kekuatan kapitalis yang bersekutu dengan kekuasaan?

Umat Buddha membentuk Forum Anti Buddha Bar yang membuat pernyataan sikap, mempertemukan pihak-pihak

yang terlibat, melakukan lobi-lobi dan mulai menempuh langkah hukum. Somasi disusul dengan pelaporan kasus ke Polda Metro Jaya dengan delik penodaan/penistaan agama sia-sia saja. Maka demo-demo menjadi pilihan, di Jakarta dan daerah. Demo di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) menghasilkan penarikan kembali Sertifikat Pendaftaran Merek Buddha Bar yang dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 15 April 2009. Memang menurut pasal 5a UU No. 15/2001 tentang Merek dinyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum. Pihak Buddha Bar menurunkan papan namanya dan menyatakan mengganti nama menjadi *Bataviasche Kunskring*.

Namun beberapa hari kemudian nama Budha Bar muncul lagi dan bar beroperasi seperti biasa. Mereka menggugat

pencabutan nama bar lewat PTUN. Walau putusan hakim menolak gugatan tersebut, Buddha Bar masih saja bertahan. Berulang-ulang demo pun berlanjut. Bahkan peserta demo sampai mengadakan ritual di lokasi Budha Bar. Banyak aktivis lintas agama mendukung. Ada rangkaian *roadshow* sampai ke daerah-daerah, *talkshow* di berbagai stasiun radio dan televisi, aksi pengumpulan tanda-tangan menolak Buddha Bar dalam berbagai bentuk.

Akhirnya Forum Anti Buddha Bar mengajukan gugatan perdata. Putusan pengadilan mengabulkan sebagian permohonan penggugat (1/11/2010). *Penggunaan nama Buddha-Bar, juga penggunaan patung, ornamen, dan simbol agama Buddha untuk restoran itu merupakan pelanggaran hukum karena jelas tidak sesuai dengan pasal 1365 KUHPperdata, bertentangan dengan nilai-nilai*

agama dan kepatutan. Terdapat unsur penodaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 dan 156 huruf a KUHP. Tidak hanya itu, Buddha Bar juga bertentangan dengan Pasal 5 UU Merek karena merek yang didaftarkan bertentangan dengan ketertiban hukum, pasal 1 ayat 3 Keputusan Gubernur tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan industri pariwisata.

Watak Demokratis dari Ajaran Buddha

Berbagai contoh “keributan” dan demonstrasi pada kalangan pengikut Buddha di atas kiranya sudah memperlihatkan salah satu segi pentingnya karakter demokratis agama Buddha.

Agama Buddha tidak didasarkan pada otoritas. Pendekatannya bersifat demokratis. Buddha mendobrak

sistem kasta yang sarat dengan diskriminasi, dan membuka pintu ordo yang disebut sanggha bagi semua orang, tanpa memandang kasta dan kedudukan sosialnya (Huston Smith, 1985). Bisa jadi sanggha adalah lembaga demokratis yang tertua di dunia, umurnya sekarang hampir dua puluh enam abad. Buddha menetapkan peraturan (*winaya*) bagi anggota sanggha, bahkan memperbaikinya, dengan mempertimbangkan opini masyarakat. Ketika menolak permohonan Ratu Prajapati yang ingin ditahbiskan menjadi biksuni, Buddha mengantisipasi reaksi masyarakat yang akan timbul terhadap perubahan nasib kaum perempuan. Perempuan di zaman itu tidak memiliki kebebasan dan diperlakukan secara tidak adil, bahkan dianggap mengotori kesucian. Ia membiarkan sekitar lima ratus orang perempuan melakukan *long-march* berunjuk rasa. Setelah mendapatkan

simpati dan respons yang positif dari masyarakat, Buddha menyetujui untuk menahbiskan perempuan dan membentuk sanggaha biksuni.

Demo bukan hal yang asing bagi pengikut Buddha. Ketika sejumlah biksu mendukung aksi di KPU, atau ketika mendampingi demo anti Buddha Bar, sempat terjadi pro dan kontra. Banyak umat berpendapat bahwa para biksu seharusnya menyingkir dari keduniawian. Di Thailand, aksi massa sudah terbiasa melibatkan kelompok biksu untuk berdoa dan memberkati. Di Tibet para lama atau biksu berulang kali melakukan unjuk rasa dan menghadapi penindasan. Pandangan hidup dan praktik yang mempertahankan cara-cara damai, tanpa kekerasan mendapatkan simpati dunia dan Dalai Lama menerima penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian. Begitu pula dengan

penerima Hadiah Nobel lainnya, Aung San Suu Kyi. Sungguhpun partainya menang dalam pemilihan umum (1990) ia tidak diberi kesempatan memimpin, bahkan dikenakan tahanan rumah oleh junta militer. Walau tak berhasil, para biksu di Myanmar pernah ramai-ramai turun ke jalan menentang kezaliman rezim penguasa.

Di Vietnam biksu-biksuni menggunakan berbagai cara yang disebut sebagai kekuatan spiritual. Gagal dengan melobi, menulis, berdoa bersama, sampai berdemo, mereka mogok makan dan bakar diri untuk membangkitkan kesadaran dan belas kasih. Membakar diri adalah sebuah bentuk pengorbanan untuk menjadi pelita di kegelapan. Salah satunya seorang biksuni, Nhat Chi Mai (1966) membakar dirinya di wihara dengan meninggalkan surat untuk presiden Vietnam Utara dan

Selatan, memohon agar perang dihentikan. Tindakan itu menggerakkan hati jutaan rakyat dan membangkitkan kekuatan cinta dari seluruh dunia.

Egalitarianisme dijelaskan oleh Buddha dengan menunjukkan bahwa berbeda dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang beragam spesies, semua manusia merupakan satu spesies yang sama. Martabat dan derajatnya sama. Manusia tidak pantas digolongkan berdasar keturunan, tetapi bisa digolongkan menurut apa yang dia lakukan (*Sn. 594-656*). Pada semua kasta dapat ditemukan orang yang berbuat jahat dan berpandangan sesat ataupun orang yang berbuat baik dan berpandangan benar (*D. III, 82-83*). Hukum alam termasuk karma bekerja dengan cara yang sama bagi semua orang. Setiap orang merupakan sasaran penderitaan, penyakit, dan kematian, artinya menghadapi masalah kemanusiaan yang sama.

Karena itu setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Semua manusia tanpa kecuali memiliki potensi dan bisa menjadi Buddha.

Respek pada Hak Asasi Manusia menyangkut persamaan hak dan kebebasan bagi setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak ada tuan dan budak. Setiap orang adalah tuan bagi dirinya sendiri (*Dhp. 380*). Namun Buddha menolak keakuan, dan menyatakan bahwa tidak ada ego yang berdiri sendiri (*Dhp. 279*). Segala sesuatu saling bergantung, saling mengada (*interbeing*). Saling pengertian dibangun dengan mengumpamakan orang lain dengan diri sendiri dan sebaliknya (*Dhp. 130*). Pemikiran ini menghadirkan kesadaran untuk menghargai dan mencintai semua bentuk kehidupan seperti halnya mencintai diri sendiri. Penderitaan

orang lain juga menjadi penderitaan diri sendiri, sehingga timbul belas kasih dan kesediaan untuk berkorban.

Sekalipun memiliki semangat misioner, agama Buddha memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih dan menentukan pendiriannya sendiri. Keyakinan tidak boleh dipaksakan, yang penting adalah kebaikan demi mengatasi penderitaan (*D. III, 56-57*). Demokrasi hanya dimungkinkan jika ada kebebasan berpikir, bukan persoalan iman. Segala sesuatu dibentuk oleh pikiran (*Dhp. 1*). Bahkan terhadap ajaran Buddha sendiri umat dianjurkan untuk tidak lekas percaya, melainkan harus bersikap kritis dan objektif. Jika terbukti tidak benar dan tidak berguna, tentu harus ditolak (*A. I, 188-192*). Apa yang diajarkan oleh Buddha bersifat terbuka dan menghargai keterbukaan (*D. II, 100*). Buddha mematahkan otoritas dan monopoli seseorang atau

segolongan orang atas kebenaran (*M. II, 171*). Ia menghargai pluralisme. Karena mempertimbangkan kebinekaan, Buddha mengajar dengan bermacam-macam metode. Toleransi yang bersifat positif menjadi sebuah kebutuhan. Orang yang berbuat baik dan bersikap menyenangkan harus dilayani dan dihormati, kendati mungkin pendapatnya berbeda (*A. I, 127*).

Pengambilan keputusan bersama, kemerdekaan mengeluarkan pendapat (*Vin. I, 115*), serta memberi kesempatan bagi perbedaan pendapat dan kritik (*D. I, 3*) tidak asing bagi pengikut Buddha. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara, pandangan ini memberi tempat bagi oposisi, dan mendasari apa yang disebut sebagai persamuan, permusyawaratan, dan kemufakatan. Untuk menyatukan kepentingan berbagai kelompok tentu perlu

kesepakatan-kesepakatan yang kompromistis dan pragmatis tanpa menyimpang dari kebenaran. Buddha juga menerapkan prinsip desentralisasi dan pendelegasian wewenang sebagaimana halnya mengizinkan para murid-Nya untuk menahbiskan sendiri biksu baru di mana saja (*Vin. I, 22*).

Pemikiran di atas jelas tidak cocok dengan pemerintahan autokrasi atau diktator dan feodal. Menurut Piyadassi, demokrasi politik non-Barat pertama kali terbentuk di India dua setengah abad yang lalu, di desa yang disebut "Panchayat". Beberapa di antaranya berkembang di bawah pengaruh agama Buddha. Di zaman Buddha sudah dikenal sistem pemerintah semacam republik. Misalnya Licchavi (kaum Vajji) yang diperintah oleh senat para sesepuh. Namun kebanyakan negara bersifat feodal, dan kerajaan-kerajaan Buddhis

menempatkan raja sebagai dewa-raja dengan kekuasaan yang nyaris absolut. Buddha memang tidak melakukan intervensi dalam masalah politik untuk mengubah bentuk suatu pemerintahan. Belakangan pengaruh Barat telah menghadirkan demokrasi di negara-negara Buddhis sehingga monarki berubah menjadi republik, atau setidaknya monarki konstitusional.

Kontrak Sosial dan Kewajiban Pemerintah

Menurut *Agganna-sutta* fenomena demokrasi dan kedaulatan di tangan rakyat dapat diikuti dari sejarah lahirnya suatu kontrak sosial untuk membentuk pemerintahan. Pada mulanya manusia dilahirkan tanpa perbedaan kedudukan. Masing-masing dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kehidupan yang damai

mulai terganggu ketika manusia yang serakah mencuri, yang licik menipu, yang kuat menindas yang lemah. Masyarakat memilih salah seorang di antaranya untuk mengadili orang-orang yang bersalah dan membayar jasanya dengan sebagian dari hasil ladangnya. Penguasa itu dipilih oleh orang banyak, diangkat melalui persetujuan rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya penguasa disebut kesatria karena ia berkuasa atas tanah pertanian yang merupakan tanah negara. Dan disebut raja, karena ia dicintai rakyat mengingat kepatuhannya menjalankan kebajikan, hukum, dan keadilan (*D. III, 92-93*).

Penguasa mendapat mandat untuk bekerja memenuhi kepentingan rakyat. Kekuasaan dimiliki hanya dalam rangka memenuhi kewajibannya. Pandangan ini tidaklah menobatkan seorang penguasa dengan hak Ilahi sehingga ia

dapat memerintah dengan sesuka hati. Penguasa harus tunduk pada kehendak rakyat, persis sebagaimana konsep politik modern yang memandang suara rakyat adalah suara Tuhan. Hanya saja kekuasaan sering memanfaatkan agama untuk legitimasi sehingga para raja disamakan dengan dewa atau putra Tuhan. Kekuasaan juga sarat dengan nepotisme, menempatkan sanak keluarga pada posisi elite. Sekali menjadi penguasa, seorang raja meneruskan kekuasaan atau mengucurkan kekayaan kepada keturunannya. Pengakuan atas golongan penguasa yang berlanjut turun-temurun (atau yang terlalu lama berkuasa) membuat penguasa mudah lupa bahwa jabatannya itu datang karena kewajiban, bukan hak.

Pemikiran Buddhis menginginkan negara kesejahteraan, bukan negara

kekuasaan. Kewibawaan pemerintah, kedaulatan, dan ketahanan suatu bangsa atau negara sangat tergantung pada kesejahteraan rakyatnya. Buddha mengemukakan tujuh syarat kesejahteraan negara tersebut (*D. II, 74-75*) adalah:

- 1) Sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan yang mengikutsertakan orang banyak (menjalankan apa yang sekarang ini kita sebut demokrasi).
- 2) Berhimpun dengan rukun, berkembang dengan rukun, mencapai mufakat dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun.
- 3) Menjunjung konstitusi yang berlaku, tidak memberlakukan apa yang belum diundangkan, tidak juga mengabaikan apa yang telah diundangkan.
- 4) Menghormati dan menyokong para sesepuh atau pemimpin, juga memperhatikan amanat mereka.

- 5) Melindungi dan menghormati kedudukan wanita (atau pihak yang lemah).
- 6) Memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama.
- 7) Melindungi orang-orang suci dan bijaksana.

Demokrasi ditempatkan dalam urutan pertama. Demokrasi merupakan Buddha sedangkan konstitusionalisme merupakan Bodhisattwa, demikian tulis Tokusuke (Nakae Chomin, 1989). Bodhisattwa adalah calon Buddha. Konstitusionalisme patut dihormati, demokrasi patut dicintai. Konstitusionalisme sekadar penginapan yang pada akhirnya harus ditinggalkan, sedangkan demokrasi merupakan rumah terakhir. Kenapa? Karena rakyat yang berkuasa lewat demokrasi.

Demokratisasi tidak hanya menyangkut sistem pemerintahan,

ideologi dan politik, tetapi juga sistem lain, seperti hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Pemantapan hukum harus diikuti komitmen dari para pemimpin dan birokrat untuk tidak melanggar hukum dalam kondisi apa pun, bersikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk melenyapkan kemiskinan dan menjamin agar setiap orang hidup puas dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sistem kemasyarakatan memberi akses menuju sumber daya sosial yang terbuka bagi semua orang (Nandasena Ratnapala, 1992).

Terdapat sepuluh kewajiban (*dasa raja-dhamma*) yang akan menunjang posisi seorang pemimpin yang demokratis. Etika kekuasaan menyentuh semua kewajiban ini (*Ja. V, 378*). Kewajiban pertama mengenai ke-dermawanan (*dana*). Pemimpin wajib memberi, setidaknya

membuka kesempatan agar rakyat sejahtera. Kesejahteraan ini tentu terkait dengan perekonomian. Kedua, penguasa harus memiliki moral yang baik (*sila*) sehingga pantas dijadikan teladan. Ketiga, kesediaan berkorban (*pariccaga*), dengan mengutamakan kepentingan umum. Dalam praktiknya sehari-hari memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mementingkan diri sendiri.

Keempat, integritas atau tulus, jujur, dapat dipercaya (*ajjava*), mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kelima, kebaikan hati termasuk bersikap menyenangkan (*maddava*). Kelihatannya lebih mudah berbaik hati kepada orang-orang kaya dan penjiilat, karena itu keberpihakan kepada yang lemah tetapi benar harus mendapat perhatian. Kebaikan hati tidak mengabaikan tanggungjawab dan keadilan. Keenam, menjalankan hidup sederhana (*tapa*).

Kesederhanaan tentu menuntut kemampuan untuk mengendalikan diri dan menjalankan disiplin. Ketujuh hingga kesembilan, tanpa amarah (*akkodha*), tanpa kekerasan (*avihimsa*), dan kesabaran (*khanti*) saling berhubungan. Amarah penguasa yang kurang sabar dapat menyusahkan dan mudah menimbulkan tindak kekerasan. Karena itu perasaan bermusuhan atau kebencian dan iktikad buruk harus dikalahkan dengan cinta kasih. Orang yang bijaksana menyadari bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang selalu dipuji atau selalu dicela, sehingga akan bersikap sabar terhadap kritik bahkan fitnah sekalipun. Kesepuluh, penguasa tidak boleh bertentangan dengan kebenaran atau melawan kehendak rakyat (*avirodhana*).

Buddha tidak ingin orang-orang menggantungkan diri kepada sesosok figur pemimpin.

Ia menganjurkan agar pengikut-Nya menyandarkan diri kepada ajaran dan hukum kebenaran yang dinamakan Dharma. Dengan itu setiap orang menjadi pemimpin dan pelindung bagi dirinya sendiri (*D. II, 100*). Pendapat serupa agaknya diungkapkan oleh Thomas Jefferson (1743-1826), presiden ketiga Amerika Serikat, bahwa, pengalaman mengajarkan manusia harus dipercaya menguasai dirinya sendiri tanpa didikte seorang pemimpin. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Buddha adalah bagaimana membuat seseorang meningkatkan kualitas dirinya sehingga mampu untuk tidak menyandarkan nasib kepada orang lain. Karena itu kepemimpinan bukan sekadar membuat orang lain terpengaruh dan tunduk, apalagi menjadi tergantung pada diri si pemimpin.

Penyebab Krisis

Mengangkat pemimpin yang tidak bermoral dinyatakan oleh Buddha sebagai salah satu penyebab kemerosotan. Penyebab kemerosotan lain adalah: kegagalan menemukan kembali apa yang hilang, kelalaian memperbaiki apa yang rusak, pemborosan karena konsumsi berlebihan (A. II, 249). Aung San Suu Kyi menerjemahkannya ke dalam bahasa modern. Katanya, krisis nasional terjadi ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas dan kebijaksanaan. Yang hilang, yaitu hak-hak demokratis yang diambil oleh kediktatoran. Yang rusak, yaitu nilai-nilai moral dan politik yang dibiarkan memburuk. Mengenai pemborosan dihubungkannya dengan perekonomian yang diurus secara ceroboh.

Dalam konteks Indonesia, kemerosotan seperti itu menghadirkan antara lain konflik dan ancaman disintegrasi, masalah HAM dan ketidakadilan atau gagalnya penegakan hukum, pengangguran, dan kemiskinan. Walau kegiatan keagamaan semakin marak, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan tindak kriminal tidak berkurang. Kebringasan massa yang melakukan kekerasan dan mengambil korban nyawa pun melibatkan kelompok agama. Ekspresi keagamaan yang menolak pluralisme, fanatis memutlakkan kebenaran sendiri, eksklusif dan sektarian, membuat orang memandang golongan lain sebagai musuh. Konflik antar-umat beragama seringkali tumpang tindih dengan ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi. Sering kita melihat penganutan nilai ganda dan disparitas antara apa yang diajarkan agama dengan sikap

hidup dan perilaku. Kesenjangan dalam hidup beragama ini agaknya lebih parah dari kesenjangan sosial-ekonomi.

Pengalaman menunjukkan bahwa komunitas-komunitas berbeda agama sulit bersatu ketika mimbar agama dimasuki kepentingan politik. Pada saat Pemilu, muncul seruan agar umat agama yang satu jangan memilih kontestan beragama lain. Dalam hal mendirikan rumah ibadah, sering terjadi kekisruhan. Untuk kepentingan politik, atau untuk mencari legitimasi, suatu justifikasi dan legalisasi kebijaksanaan dan tindakan politik cenderung memanipulasi agama dan mereduksi pesan-pesan suci agama. Agama mudah diperalat untuk saling menghancurkan antar sesama manusia. Agama tidak lagi melindungi mereka yang benar dan lemah. Minoritas tidak memiliki rasa aman.

Reformasi di Indonesia sudah berjalan lebih dari dua belas tahun. Secara struktural tatanan pemerintahan mengalami perubahan. UUD 1945 saja diubah empat kali, dan agaknya akan menyusul amandemen berikutnya. Namun krisis tidak juga berakhir. Belum ada pemulihan ekonomi dan perbaikan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Ketergantungan pada negara asing pun semakin besar. Kemajuan dalam hal kebebasan pers, pembagian kekuasaan termasuk otonomi daerah, pemilihan umum sampai pemilihan kepala daerah secara langsung dan munculnya banyak partai, mengundang pertanyaan karena belum mengubah nasib rakyat.

Adam Curle melihat bahwa dalam masalah sosial orang yang berkedudukan lemah sering dijadikan kambing hitam dan dikorbankan. Kenapa orang-orang

yang tak berdaya disalahkan?
Orang-orang yang berkuasa, yang kaya dan serakah, yang telah memberi kontribusi hingga terciptanya kondisi yang membuat orang-orang kecil mengganggu keamanan dan ketertiban. Sebenarnya mereka mencontoh kejahatan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh orang-orang besar yang mengandalkan kekuasaan dan kekayaan.

Keterbatasan demokrasi

Jika demokrasi diartikan sebagai kebebasan, kebebasan bisa bagus, bisa juga menimbulkan kekacauan. Piyadassi mengingatkan tentang keterbatasan demokrasi. Demokrasi memungkinkan terjadinya berbagai tindakan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan ditentukan oleh suara terbanyak, padahal kebenaran sesungguhnya tidak

ditentukan oleh jumlah suara. Banyaknya Golput seharusnya menunjukkan kegagalan demokrasi, namun dianggap tidak memengaruhi legitimasi pemilu. Janji-janji politik sering hanya merupakan kebohongan Pemilu biasanya dipenuhi intrik-intrik, kecurangan, jual beli suara dan konflik. Massa pendukung mudah terjerumus dalam tindakan anarki dan berbagai bentuk kekerasan. Ketika ketertiban, ketenteraman, kedamaian, dan kerukunan terganggu, pantas dipertanyakan apa demokrasi pasti akan meningkatkan kualitas hidup manusia?

Tanpa uang biasanya tidak bisa memenangkan Pemilu. Agar bisa mengembalikan modal yang dipakai selama Pemilu, si pemenang akan berbagi kesempatan dengan sekutunya untuk ikut berkuasa dan menjadi lebih kaya, termasuk korupsi. Kepentingan umum menjadi

kepentingan pribadi atau partai dan golongan. Agaknya tidak ada wakil rakyat, yang ada wakil partai. Karena itu demokrasi perlu disertai kearifan dan tanggung jawab moral. Praktik demokrasi menghendaki kondisi yang mendorong pertumbuhan potensi manusia untuk secara cerdas bisa memilih yang terbaik bagi individu dan bagi masyarakatnya. Kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak bukan merupakan tujuan. Yang menjadi tujuan adalah bebas dari penderitaan, menyangkut diri sendiri ataupun pihak lain.

Penutup

Gus Dur pernah berkata, negara tidak perlu mengakui sebuah agama, karena tanpa pengakuan negara, agama itu tetap hidup. Negara tidak boleh mengatur kehidupan intern agama, atau membiarkan kekuasaannya disalahgunakan untuk kepentingan

segolongan penganut agama tertentu dan menekan yang lain. Umat Buddha tentu berterimakasih kepada pemerintah yang menempatkan agamanya setara dengan yang lain. Namun pengalaman menunjukkan bahwa di bawah bimbingan pemerintah, justru telah terjadi pemaksaan dan rekayasa berupa praktik anti-demokrasi, yang mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM. Pembinaan agama dilakukan untuk kepentingan yang bersifat politis. Pemerintah telah mencampuri terlalu jauh urusan intern agama Buddha. Terdapat konspirasi aparat dan pengusaha, yang memanfaatkan organisasi agama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri.

Reformasi seharusnya menumbuhkan semangat demokrasi yang dewasa atau bertanggung jawab, yaitu demokrasi yang mempersatukan bukan menceraikan. Kita

mengubah paradigma, dari autokratis ke demokratis, sentralistis ke desentralisasi, vertikal hierarkis ke horisontal egaliter, feodalistis ke komunalistis, seragam ke beragam, budaya tertutup ke budaya terbuka, eksklusif ke universal. Pemikiran keagamaan pun perlu semakin menghargai pandangan inklusif dan pluralisme.

Perjumpaan agama-agama menjadi rahmat yang membuat kita bisa saling berbagi dan belajar. Misi kita yang beragama bukan memaksakan kebenaran kita sendiri kepada orang lain, tetapi untuk hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang kita sadari, untuk memahami dan menyatakan harmoni batin itu dalam setiap bagian kehidupan kita. Kebenaran bukan membenaran, dan agama bukanlah alat untuk menyakralkan kekuasaan yang mengabaikan cinta dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Curle, Adam. *"Peace & Reconciliation for the Present & Future"*, *Seeds of Peace*, Vol. 11, No. 3, 1995.
- Aung San Suu Kyi. *Bebas dari Ketakutan*. Diterjemahkan oleh Sugiarta Sriwibowo. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Dhammananda, K. Sri. *What Buddhists Believe*, Taipei: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1993.
- Ekoputro, Zaenal Abidin dkk. *Berpeluh Berselaras Buddhist-Muslim Meniti Harmoni*. Depok: Kepik Ungu, 2011.
- Chomin, Nakae. *Perbincangan Tiga Pemabuk Tentang Pemerintahan*. Diterjemahkan oleh Sylvia. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Coppel, Charles A. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah PSH. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

- Lathouwers, M. A. "Y. A. Ashin Jinarakkhita, Agama Buddha Indonesia di Antara Benua Timur dan Barat", *Manggala*, Okt-Nov. 2002.
- Oetama, Jakob. "Stavira Ashin Jinarakkhita, Bikhu Pertama Indonesia Abad XX", *Intisari*, Oktober 1963.
- Piyadassi. *Spektrum Ajaran Buddha*. Diterjemahkan oleh Hetih Rusli dkk. Jakarta: Yayasan Pendidikan Buddhis Tri Ratna, 2003.
- Ratnapala, Nandasena. *Buddhist Sociology*. Delhi: Sri Satguru Publications, 1993.
- Salmon, Cl. dan D. Lombard. *Klenteng-Klenteng Masyarakat Tionghoa di Jakarta*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1985.
- Smith, Huston. *Agama-Agama Manusia*. Diterjemahkan oleh Saafroedin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Slametmulyana. *Nagarakretagama dan Tafsir*

- Sejarah*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979.
- Sugianto, F. "Buddha Bar dalam Perspektif Yuridis". *Manggala* edisi I, 2009.
- "Buddha Bar, Kapan Bubar". *Manggala* edisi IV, 2010.
- Tabloid Berita Mingguan, *Suar* 168, September 1999.
- Yusuf, Slamet Effendy dan Benny Susetyo. "Buddha Bar dan Perlindungan Umat Beragama". *Sinar Harapan*, 26 Februari 2009.
- Wijaya-Mukti, Krishnanda. *Kehidupan Beragama di Tengah Krisis Nasional*. Makalah pada Seminar Aktualisasi Agama dalam Konteks Perubahan Sosial, Program Studi Ilmu Perbandingan Agama Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23 Agustus 2001.
- *Wacana Buddha-Dharma*. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan & Sangha

Agung Indonesia, cet. ke-3,
2006.

----- "Perempuan dan Demokrasi
dalam Perspektif Agama
Buddha." Dalam *Perempuan,
Agama & Demokrasi*. Editor M.
Subkhi Ridho. Yogyakarta:
LSIP, 2007.

[http://id.wikipedia.org/wiki/
Majapahit](http://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit)

[http://id.wikipedia.org/wiki/
Sriwijaya#cite_note-TAYLOR-7](http://id.wikipedia.org/wiki/Sriwijaya#cite_note-TAYLOR-7)

BUDDHAYANA

Tinjauan Skolastik

Krishnanda Wijaya-Mukti

Penelusuran Kitab Suci

Terdapat dua versi Kitab Suci Tripitaka. Yang satu bersumber pada bahasa Pali, dan yang lain bersumber pada bahasa Sanskerta. Kita tidak memiliki bukti konkret mengenai bahasa apa yang dipakai oleh Buddha Gotama. Agaknya Buddha menggunakan lebih dari satu bahasa/dialek. Dalam *Aranavibhanga-sutta* Buddha menasihati para biksu untuk menyesuaikan diri dengan bahasa-bahasa lokal tempat

mereka membabarkan ajaran (*M. II, 234*). Menurut *Kinti-sutta*, orang seharusnya lebih memperhatikan makna dan jiwa daripada hanya kata-kata (*M. II, 239*). Karena itu Buddha mengizinkan para pengikut-Nya untuk mempelajari ajaran Buddha dalam bahasa masing-masing (*Vin. II, 139*).

Penemuan dan penelitian atas sisa-sisa naskah Buddhis kuno seperti *Udanavarga* dan *Dharmapada Gandhari*, membuktikan bahwa naskah-naskah ini bukan merupakan terjemahan dari Kitab Suci Pali. Sebuah riset telah mengungkapkan bahwa baik Kitab Suci Pali maupun Sanskerta dapat ditelusuri ke asal yang sama. Empat dari lima Kitab *Nikaya* Pali dapat ditemukan padanannya pada empat Kitab *Agama* Sanskerta. Kitab Suci Pali yang dikenal sekarang ini berasal dari penulisan di Sri Lanka. Berdasarkan penelitian linguistik,

sekalipun mirip, Kitab Suci itu bukan yang disusun dalam Konsili Ketiga.

Penyusunan Kitab Suci dimulai pada Konsili Pertama, tiga bulan setelah Buddha parinirwana. Peserta Konsili 500 orang, sedangkan jumlah Arahata jauh lebih banyak dari itu (pada peristiwa Magha Puja, tercatat 1250 Arahata). Menurut Kitab Suci sendiri, Purana yang kembali dari daerah selatan sesudah berakhirnya Konsili, memilih berbeda pendapat dengan hasil Konsili, mengingat Dharma miliknya sendiri yang telah ia terima langsung dari Buddha (*Vin. II, 290*).

Bisa dimengerti kalau terdapat sejumlah ajaran Buddha yang autentik, yang tidak terkumpul dalam Konsili Pertama. Dan menjadi cukup beralasan, lewat tradisi oral yang panjang, sampai kemudian dituliskan, keranjang

Kitab Suci terbuka untuk dimasukkan naskah-naskah lain di kemudian hari. Dalam Kitab Suci dimasukkan pula khotbah-khotbah para siswa utama, seperti Sariputra, Moggallana, Ananda, yang dipandang kalau diberikan oleh Buddha sendiri akan sama isinya, sehingga dihargai seperti sabda Buddha.

Buddha memberi petunjuk empat pengujian otoritas, tentang apa yang dinyatakan oleh seseorang diterima langsung dari Buddha, atau dari Sanggha, atau dari beberapa biksu senior, atau dari satu biksu senior, yang harus sesuai dengan Sutta dan Winaya (*D. II, 123-125*). Watak yang demokratis dan menghargai pluralisme, ditunjukkan oleh Buddha antara lain dalam pesan kepada Cunda, agar berkelompok mempelajari semua ajaran bersama, dan tidak mempertengkarkannya (*D. III, 127*). Buddha pun mengajarkan

bahwa bagi orang yang pandai tidaklah cukup melindungi kebenaran dengan membuat kesimpulan: hanya ini saja yang benar dan lainnya adalah keliru (*M. II, 171*). Sebagai agama yang universal, ajaran Buddha tidak bersifat eksklusif.

Di zaman Buddha tidak terdapat penggolongan Therawada, Mahayana, atau Tantrayana. Dari kitab sejarah *Dipavamsa* (abad IV M.), *Mahavamsa* (abad V M.) dan *Samantapasadika* (Komentari Winaya) diketahui bahwa istilah Therawada pertama kali dikenal setelah Konsili Pertama. Apa yang diterima dalam Konsili itu disebut Therawada, Theriya, atau Therika (Tradisi Para Sesepuh). Therawada telah masuk di Sri Lanka pada abad III sebelum Masehi, yang pada waktu itu tidak dikenal sebutan Hinayana atau Mahayana. Kedua istilah ini tidak ditemukan dalam Kitab Pali

maupun kitab sejarah *Dipavamsa* dan *Mahavamsa*. Bila kita sekarang mengenal penggolongan Therawada dan Mahayana, perlu dimengerti bahwa Therawada tidak sinonim dengan Hinayana, istilah yang muncul di India kemudian. Sekarang ini tidak ada lagi aliran Hinayana yang berbentuk sebagai kumpulan umat.

Buddha mengajar dengan banyak cara (termasuk tahapan) dan dengan berbagai alasan (*upaya-kausalya*). “Kemudian Tathagata memperhatikan kapasitas dari para makhluk, yang cerdas atau pun yang bodoh, yang rajin berusaha atau pun malas. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ia mengkhotbahkan Dharma kepada mereka dengan bermacam-macam cara yang tak terbatas, sehingga hal ini menyebabkan mereka gembira dan dapat memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya." Air hujan yang sama jatuh berasal dari awan, hanya tumbuh-tumbuhan yang berbagai ragam menjadi basah menurut porsinya, banyak atau sedikit sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dapat tumbuh berkembang (*Sdmp. V*). Bandingkan bagaimana cara Buddha menuntun murid-murid-Nya, seperti Ananda, Culapanthaka, Moggallana, atau Maha Kassapa. Lalu, cucu murid-Nya yang tidak pandai menghafal bisa tidak cocok dengan guru seperti Ananda. Lain halnya kalau ia mendapatkan guru seperti Culapanthaka. Kita bisa menemukan banyak contoh lain seperti ini. Buddha dapat dibandingkan sebagai orang yang menyediakan makanan prasmanan bagi kita, dan kita bebas untuk memilih makanan yang cocok untuk kita; Buddha tidak menyediakan nasi kotak yang isi dan banyaknya sama untuk setiap orang. Mudah

dimengerti perbedaan-perbedaan metode melahirkan aliran-aliran sekte yang pada dasarnya adalah perguruan.

Menurut *Saddharmapundarika-sutra*, sekalipun banyak metode, Buddha Gotama (bahkan semua Buddha) mengajarkan Hukum Kebenaran yang sama. Ia menunjukkan Jalan Agung dengan ajaran tiga wahana (*triyana*), yaitu Srawakayana, Pratyekabuddhayana, dan Bodhisattwayana. "Seluruh Hukum Kebenaran itu hanya bagi Satu Kendaraan (*ekayana*), yaitu Buddhayana, sehingga para makhluk yang telah menerima Hukum dari para Buddha tersebut akhirnya dapat memperoleh Penerangan Sempurna." Mengikuti Jalan Bodhisattwa untuk menjadi Samyak Sambuddha adalah tujuan tertinggi dan terluhur dalam usaha bagi kebebasan yang lain. Tetapi tiga macam Penerangan

Sempurna tersebut berada dalam jalan yang sama, bukan saling berbeda (*Sdmp. II*).

Samdhinirmovacana-sutra menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa mereka yang mengikuti garis Srawakayana, atau Pratyekabuddhayana, atau garis para Tathagata (Mahayana) mencapai nirwana dengan jalan yang sama. Untuk mereka semua hanya ada satu Jalan Kesucian (*Visuddhi-marga*) dan satu Kesucian (*Visuddhi*), tidak ada yang kedua. Srawakayana dan Mahayana disebutkan sebagai satu kendaraan, satu yana (*ekayana*).

Menurut Biksu Piyasilo, istilah tunggal yang menyatukan semua aliran adalah *Ekayana*.

Satipatthana-sutta memakai sebutan ini untuk definisi metodologis (*D. II, 290*) dan *Saddharmapundarika-sutra*

mendefinisikan jalan tunggal sebagai Kendaraan Buddha.

Dewasa ini kita menemukan banyak aliran yang mengklaim dirinya sebagai ajaran Buddha yang benar. Kebenaran memang harus diuji, salah satunya adalah merujuk pada Kitab Suci dan mengenali nilai-nilai dasar dari doktrin dalam praktiknya sesuai dengan prinsip ajaran Buddha. Buddha bersabda, "Sebagaimana halnya dengan samudra raya yang hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa garam, demikian pula Dharma hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa pembebasan." (*Ud. 56*).

Konsep Buddhayana

Buddhayana identik dengan Ekayana, terminologi teknis yang dipakai untuk merujuk dan merangkum pandangan, aliran ajaran, atau pun pengertian agama Buddha secara

keseluruhan, yang menegaskan bahwa Dharma atau kebenaran itu hanya satu. Istilah ini dipakai untuk mengikis kekeliruan pandangan bahwa ada banyak agama Buddha yang tercermin dari banyaknya aliran, yang menunjukkan kebenaran yang berlainan. Dalam Buddhayana, keanekaragaman dan adaptasi bukan perbedaan atau pemecahbelahan, melainkan pada hakikatnya adalah bagian integral dari Ekayana. Buddhayana bukanlah sebuah sekte, melainkan agama Buddha itu sendiri.

John Blofeld mengumpamakan agama Buddha itu seperti sebuah kota yang dikelilingi tembok besar dengan begitu banyak gerbang, sehingga pendatang baru khawatir akan menjumpai jaringan jalan yang rumit, namun sesungguhnya, memasuki pintu yang mana pun, kalau ia berjalan terus, ia akan menemukan jalan memusat di bawah satu benteng perlindungan.

Thich Nhat Hanh mengemukakan seperti bermacam-macam obat diperlukan untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, ajaran Buddha juga membuka pintu-pintu Dharma yang sesuai bagi setiap orang dengan keadaan yang berlainan. Meski pintu-pintu itu bisa berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain, mereka semua adalah pintu Dharma.

Dr. D.T. Suzuki menulis: Tiada terdapat dua aliran agama Buddha, Mahayana dan Hinayana sebenarnya satu, dan semangat pendiri agama Buddha terdapat dalam kedua macam aliran ini. Biksu Dr. K. Sri Dhammananda mengatakan, pengikut Buddha sejati dapat menjalankan agama ini (Buddha) tanpa melekat pada mazhab atau sekte apa pun. Menurut Biksu Piyasilo, bila seseorang mengerti satu tradisi, apakah itu Therawada, Mahayana, atau Wajrayana, ia juga akan

memahami semua tradisi yang lain. Namun ia harus berusaha dan membuka pikirannya. Dengan kata lain sikap fanatik yang membuta dan eksklusif pada satu sekte, menunjukkan ketidakpahaman akan konsep dasar ajaran Buddha sendiri. Mereka yang mencela tradisi Buddhis mana pun bahkan sesungguhnya tidak memahami tradisinya sendiri.

Menurut Biksu

Dharmawiranatha, Buddhayana bertujuan mencapai suatu perpaduan antara intisari ajaran dengan pola hidup dan kebudayaan seseorang. Sumbangan yang dapat diberikan agama Buddha kepada kebudayaan bangsa adalah suatu pendirian non-sektarian, sikap yang mencari harmoni dan kerukunan. Buddhayana tidak bermaksud agar sekte-sekte yang berbeda itu harus lenyap atau

melepaskan identitas mereka yang berlainan.

Buddhayana menolak sikap sektarian, yang tidak memiliki toleransi terhadap ajaran dan praktik dari berbagai aliran di dalam agama Buddha selain dari aliran sendiri. Kelemahan sektarian jelas, membatasi wawasan, mempertebal egoisme, menimbulkan kebencian, yang tentu saja akan merintangai kemajuan spiritual.

Prospek Buddhayana

Dunia serba global bergerak menuju unifikasi. Krishnaputra melihat kecenderungan umat Buddha bersatu mulai dari keinginan untuk mempunyai lambang persatuan yang diterima oleh ketiga mazhab, sehingga muncul Bendera Buddhis Internasional (1885). Pada tahun 1891 H.S. Olcott menyusun 14 pasal Dasar-dasar Keyakinan

Agama Buddha, yang disetujui oleh para pemimpin Mahayana dan Therawada.

Tahun 1943, di London terbit majalah Buddhis Internasional "*The Middle Way*" yang tidak memandang mazhab. Pada tahun 1950 berdiri WFB (*World Fellowship of Buddhist*), disusul dengan WBSC (*World Buddhist Sangha Council*) di tahun 1966, yang menghimpun semua mazhab/sekte agama Buddha. Dalam WFB terdapat lebih dari 25% institusi/organisasi yang memiliki semangat Buddhayana. Mereka memakai sebutan antara lain non-sektarian, intersektarian, menerima segala tradisi, terbuka untuk semua sekte, tidak berafiliasi dengan sekte.

Dalam Kongres Dunia I dari WBSC di Colombo (1967), telah disepakati secara bulat rumusan prinsip-prinsip dasar agama Buddha. Dalam rumusan tadi, baik

Therawada maupun Mahayana (termasuk Tantrayana) mempunyai prinsip yang sama. Perbedaan-perbedaan mengenai tata kehidupan biksu, adat dan kepercayaan Buddha lokal, upacara, tradisi, dan kebiasaan hanyalah perwujudan luar, tidak boleh dianggap sebagai dasar Ajaran Buddha.

The Third Annual International Buddhist Seminar di New York (1974) mencetuskan harapan dari para peserta seminar untuk tidak mengklasifikasi ajaran Buddha ke dalam bermacam-macam yana. Harapan ini disambut oleh Dr. Buddhadasa Kirtisinghe, ketua seminar, yang mengusulkan sebutan "Ekayana" atau "Buddhayana".

Dr. Ananda W.P. Guruge yang bekerja untuk Unesco, dalam ceramahnya yang berjudul *Universal Buddhism* menyatakan: Saya meramalkan timbulnya

kecenderungan-kecenderungan baru dalam agama Buddha di Barat. Interaksi yang rapat dari berbagai aliran dan sekte yang berbeda akan berakibat saling mempengaruhi. Pakar-pakar Barat telah menyuarakan bahwa mereka lebih menginginkan suatu bentuk agama Buddha yang menggabungkan ketiga tradisi dari Therawada, Mahayana, dan Wajrayana. Kita mendengar istilah-istilah Triyana dan Buddhayana sebagai nama untuk bentuk gabungan dari agama Buddha. Kita seharusnya tidak merendahkan perkembangan alamiah ini, karena beginilah sebenarnya bagaimana ajaran Buddha berkembang selama 2500 tahun terakhir.

Penganutan di Indonesia

Wangsa Syailendra adalah penganut Buddhayana, demikian tertulis dalam *Negarakretabhumi* karya Pangeran Wangsakerta.

Candi Borobudur yang dibangun Wangsa Syailendra mencerminkan bagaimana ajaran Therawada, Mahayana, dan Wajrayana menyatu secara harmonis.

Di mana pun di muka bumi ini dapat ditemukan hubungan yang erat antara agama dan kebudayaan. Akulturasi kebudayaan bisa menghasilkan percampuran yang seringkali mengaburkan bentuk asal dan ekspresi agama Buddha. Jika bersifat peleburan (*blending*), disebut sinkretisme, contohnya fenomena Siwa Buddha di Bali. Di zaman Majapahit, Siwa Buddha tidak berbaur dalam keseluruhan sistemnya, sehingga lebih tepat dinamakan paralelisme (atau sebutan lain *coalition*). Ini menyangkut hubungan antar agama. Dalam hal intra-agama, adalah suatu kebodohan jika ada pendapat bahwa mempelajari dan menganut ajaran berbagai sekte yang bersumber dari satu *nabi* itu

sinkretisme. Dogma atau doktrin agama atau akidah setiap aliran dalam satu agama seharusnya tidak berbeda, sehingga pantas dinamakan agama yang sama.

Pada tahun 1929, di Jawa terbentuk organisasi *Association for the Propagation of Buddhism in Java*, yang kemudian menjadi *Java Buddhist Association*, yang sekalipun berwatak Therawada (pusat di Thaton, Myanmar), namun kuat dipengaruhi Teosofi dan menjalin kerja sama dengan para biksu Mahayana di klenteng-klenteng. Bagaimana Mahayana dan Therawada tidak terpisahkan dalam kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia, tercermin dari figur Ashin Jinarakkhita yang mendapat penahbisan kedua cara. Yang pertama ditahbiskan sebagai samanera oleh Biksu Pen Ching dari Kong Hua Sie Jakarta, dan yang kedua oleh Mahasi Sayadaw di Rangoon, Myanmar. Di wihara-

wihara binaannya puja bakti memakai paritta Pali juga mantra Sanskerta dan Mandarin. Dalam pembacaan *Vandana* paritta Pali, terdapat nama berbagai Buddha dan Bodhisattwa-Mahasattwa yang hanya dikenal dalam Mahayana. Umat Buddha tidak membeda-bedakan aliran sebelum Sanggha Therawada memisahkan diri (1972), yang disusul kemudian dengan munculnya majelis-majelis sekte.

Kelompok PUUI/MUABI tetap berwatak non-sektarian. Di lingkungan organisasi di bawah Sangha Agung Indonesia ini tetap terdapat bermacam-macam aliran yang tidak disekat oleh pagar-pagar kelembagaan sekte. Ketika MUABI diminta oleh pemerintah Orba untuk mengganti nama, nama Buddhayana dipakai untuk menunjukkan sikap itu (1979). Di tahun 1994, kemelut dalam tubuh organisasi Walubi dan penyalahgunaan kekuasaan

memojokkan Buddhayana sebagai aliran sesat yang sinkretis dan menghidupkan adat Cina. Namun Sangha Agung Indonesia dan MBI tetap konsisten dan kini segalanya telah berubah.

Praktik-praktik Buddhayana tampak dalam berbagai bentuk, di antaranya: penggunaan satu wihara yang sama untuk puja bakti oleh penganut semua mazhab, Dharmadesana yang tidak harus eksklusif berdasar satu tradisi, hari-hari suci termasuk *Maghapuja* dan *Ulambana* yang dirayakan tanpa membedakan tradisi, pembacaan *Dhammapada* oleh penganut semua mazhab. Umat Buddha mempelajari bermacam-macam ajaran dan tradisi Buddhis secara seimbang. Kecocokan terhadap ajaran tentu saja merupakan masalah pribadi. Dan sebagaimana pesan Biksuni Thubten Chodron: Bagaimanapun terbuka untuk pendekatan yang

berbeda tidak berarti mencampuradukkan semuanya. Khususnya teknik-teknik meditasi dari tradisi yang berbeda jangan dicampur dalam satu latihan meditasi.

Kepustakaan

- Aryamaitri, Sthawira. "Agama Buddha Universal: Tuntutan Dunia Global". *Pustaka Ekayana: Buddhayana, edisi ke-12, Mei 1999*.
- Chodron, Thubten. *Agama Buddha dan Saya*. Diterjemahkan oleh E. Suwarnasanti. -: Penerbit Karaniya, 1990.
- Juangari, Edij. *Menabur Benih Dharma di Nusantara*. Bandung: Yayasan Penerbit Karaniya, 1995.
- Pannavaro, Bhikkhu. *Agama Buddha (Buddha Dharma) Hanya Satu*. -: Yayasan Mendut, 2527 BE.

- Piyasilo, Ven. *Jalan Tunggal, Studi Perbandingan Mengenai Mahayana dan Therawada*. Diterjemahkan oleh Edij Juangari. Bandung: Yayasan Penerbit Karaniya, 1995.
- Suryananda (ed). *Memahami Buddhayana*. Bandung: Yayasan Penerbit Karaniya, 1995.
- Wijaya-Mukti, K. *Belajar Menjadi Bijaksana*. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan, 1993.
- Wijaya-Mukti, K. *Berebut Kerja Berebut Surga*. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan, 1995.
- —. *Dharma Sekilas*. Surabaya: Bodhimanda Rumah Suci, 1981.

Pemberdayaan Dharmaduta Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas

Krishnanda Wijaya-Mukti

Pendahuluan

Manusia menurut paham Buddhis tidak pernah dianggap hanya untuk dirinya sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari keseluruhan masyarakat dan alam semesta. Perkumpulan siswa Buddha yang disebut Sanggha didirikan bukan saja untuk kepentingan anggotanya, tetapi sekaligus pula untuk kepentingan semua makhluk. Dalam konteks inilah agama Buddha bersifat misioner, sebagaimana amanat Buddha kepada enam puluh

siswa-Nya yang telah menjadi
Arahat:

“Para Biksu, pergilah mengembara demi kebaikan orang banyak, membawa kebahagiaan bagi orang banyak, atas dasar kasih sayang terhadap dunia, untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Para Biksu, ajarkanlah Dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Bentangkanlah baik dalam ungkapan kata-kata atau pun maknanya kehidupan suci yang sempurna, murni sepenuhnya. Terdapatlah makhluk-makhluk yang matanya tertutup sedikit debu, yang bila tidak mendengar Dharma akan jatuh. Tetapi apabila mereka mempelajari Dharma, mereka akan tumbuh berkembang” (Vin. 1,21).

Sekalipun memiliki semangat misioner, agama Buddha sangat menghargai kebebasan setiap

manusia untuk memilih dan menentukan sikapnya sendiri. Keyakinan agama tidak boleh dipaksakan. Kepada Nigrodha misalnya, Buddha menjelaskan bahwa Ia menyampaikan ajaran tidak dengan keinginan untuk mendapatkan pengikut, atau membuat seseorang meninggalkan gurunya, melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya, menyalahkan keyakinan atau doktrin yang telah dianut dan dipandang baik. Ia hanya menunjukkan bagaimana membersihkan noda, meninggalkan hal-hal buruk, yang menimbulkan akibat yang menyedihkan di kemudian hari (*D. III, 56-57*).

Penyiaran agama Buddha dapat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang menyampaikan temuannya kepada rekan-rekannya agar kebenaran itu dapat diuji dan dibuktikan oleh rekan-

rekannya sehingga memungkinkan mereka mencapai kebenaran tersebut. (Harold Coward, 1985). Agama Buddha menyebar luas secara luwes dan damai. Sekalipun berhadapan dengan agama-agama lain yang sudah mapan, tidak pernah terjadi perang atau penganiayaan atas nama penyiaran agama Buddha. Ketika penganutan agama atau kepercayaan lain terbatas pada satu etnis tertentu, agama Buddha telah menyebar melampaui batas etnis dan negara.

Keterpanggilan Dharmaduta

Mereka yang menyiarkan agama Buddha atau membabarkan Dharma disebut dharmaduta. Ada sejumlah alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjadi dharmaduta. Yang paling penting, keinginan untuk berbuat baik. Seseorang terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya

sendiri dan bagi orang lain, membuat hidup menjadi penuh arti. Rasa terpanggil untuk mewujudkan sesuatu yang baik di dunia, merupakan kebutuhan berdasarkan cita-cita dan nilai yang terdalam, yang jauh dari keakuan. Beda dari ambisi yang sarat dengan kepentingan sang aku (ego). Sebagian orang ingin berbagi mengenai apa yang telah ia ketahui dan ia alami, sesuatu yang dipandang juga dibutuhkan oleh orang lain. Sebagian yang lain menemukan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan keterampilannya.

Bagaimanapun, menurut Buddha, pemberian yang terbaik adalah pemberian Dharma. Jasa kebajikan yang terbaik adalah mengajarkan Dharma berulang-ulang kepada orang yang menaruh perhatian. Perbuatan yang terbaik adalah mendorong, menanam, membangun keyakinan kepada mereka yang tidak memiliki

keyakinan, moralitas kepada mereka yang tidak bermoral, kemurahan hati kepada mereka yang kikir, dan kebijaksanaan kepada mereka yang bodoh (A. IV, 364).

Buddha mengarahkan setiap siswa-Nya agar memiliki kemampuan menjadi pembabar Dharma. Seorang umat dapat menjadi seorang siswa yang memiliki keyakinan, saleh, dan terpelajar, tetapi bukan seorang pembabar Dharma. Sampai sejauh itu, ia belum sempurna. Ia harus memperbaiki kekurangan ini, menjadi seorang siswa yang memiliki keyakinan, saleh, terpelajar, dan juga seorang pembabar Dharma. Bila ia telah memiliki semua itu, ia sempurna sampai batas tersebut. Lebih jauh lagi ia masih harus menyempumakan diri dalam berbagai keahlian yang lain (A. V10).

Pahala dari perbuatan ini banyak disebutkan dalam Kitab Suci. Barangsiapa memelihara, memperbanyak, atau mengkhotbahkan Sutra kepada orang lain akan memperoleh pahala, ia terlindung, mencapai kemuliaan, mendapatkan tempat bersama Tathagata yang akan meletakkan tangan-Nya di atas kepala-kepala mereka (Saddharmapundarika-sutra X). Seseorang yang dapat mempelajari baik-baik, mempertahankan, membacakan, dan menjelaskan Sutra kepada orang lain, akan memperoleh pahala kebajikan yang tak terukur, tak terbatas (Vajracchedika-prajnaparamita-sutra 15).

Seorang umat Buddha dengan semangat Bodhicitta mengembangkan belas kasih dan kebijaksanaan, untuk menyempurnakan diri sendiri sekaligus menolong orang lain mencapai kesempurnaan. Visi dan

misinya sebagai dharmaduta dikembangkan dari Ikrar Bodhisattwa: komitmen menghargai dan menyelamatkan semua bentuk kehidupan, memadamkan hawa nafsu, terus-menerus mempelajari Dharma dan melatih diri, dan dengan segala cara menghadirkan hakikat Buddha dalam kehidupan.

Dimensi Personal dan Struktural

Kedharmadutaan memiliki dimensi personal dan struktural. Betul sejumlah individu membentuk masyarakat, tetapi masyarakat bukan hanya merupakan jumlah total dari orang perorang. Pendapat yang naif menganggap bahwa jika masing-masing orang dalam masyarakat mencapai kebersihan batin, seluruh masyarakat dengan sendirinya akan menjadi baik. Namun dalam praktiknya, tanpa disertai oleh perubahan struktural yang sejajar, kekuatan melawan

yang bergerak dalam masyarakat mengalahkan perorangan dalam usahanya mencapai kesempurnaan yang diinginkan (Aloysius Pieris, 1996)

Dalam dialog multilateral World Council of Churches (1974) Bixsu Ananda (alm.) mengutarakan pentingnya memperbaiki individu terlebih dahulu, dan dunia pun akan menjadi baik. Ia menceritakan tentang seorang anak yang diminta untuk memasang potongan-potongan gambar peta dunia yang telah disobek. Tugas itu terlalu sulit bagi si anak sampai dia menemukan gambar sketsa orang yang terdapat di balik kertas peta. Anak itu berhasil memasang kembali gambar orang dan dengan sendirinya peta dunia pada halaman sebaliknya juga sekaligus mendapatkan bentuknya yang benar. Bixsu Thich Nhat Hanh seketika menanggapi dan menarik

perhatian semua orang pada aspek lain yang nyaris tidak diperhatikan. Bukan setiap gambar orang yang bila diperbaiki dengan sendirinya membuat peta dunia menjadi baik. Apa yang penting dalam cerita itu, gambar orang yang membawa gambar dunia di sebaliknya. Artinya jika kita ingin memperbaiki dunia, yang perlu diperbaiki adalah orang dalam hubungan dinamis dengan masyarakat, bukan hanya orang yang terpisah dari masyarakatnya. Karena itu diperlukan perubahan struktural.

Dapat dimengerti, Buddha tidak hanya mengajarkan reformasi spiritualitas personal, tetapi juga membentuk komunitas dan menggerakkannya. Sanggha biksu, dengan keanggotaan yang jelas identitasnya, jelas pula tujuannya. Struktur monastik ini membawa personal individual dan kelompok mencapai tujuan akhir. Dengan itu pula Buddha

membongkar kultur dan struktur sosial yang timpang atau diskriminatif di zamannya. Agama Buddha menjadi besar karena nilai spiritualnya sekaligus karena keberhasilan dari pelebagaan dan pembudayaannya. Kita akan menemukan dimensi personal seperti kepemimpinan, komitmen, kerjasama, dan partisipasi total ke arah penyempurnaan; dan dimensi struktural seperti organisasi, visi, misi, strategi, rencana, prosedur, dan pengendalian. Tanpa organisasi dan manajemen, yang ada hanya gerombolan manusia, dan tidaklah terbayangkan bagaimana agama Buddha dapat bertahan sampai sekarang.

Modal Manusia

Dewasa ini penganut agama Buddha merupakan kelompok minoritas di Indonesia. Kita boleh percaya pada ramalan mengenai kebangkitan kembali agama Buddha 500 tahun setelah

sirnanya Kerajaan Majapahit, karena agama Buddha semakin mendapatkan tempat di negara ini. Sebagaimana juga yang diramalkan oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1990) bahwa pada milenium ketiga di seluruh dunia akan terjadi kebangkitan agama, termasuk Buddha. Hasil sensus beberapa dekade menunjukkan adanya peningkatan jumlah umat Buddha, walau secara persentase, sekitar 1 % dari seluruh penduduk, cenderung sedikit menurun.

Bisa jadi statistik tidak membuktikan apa-apa. Angka yang bersumber dari data Pembimas Buddha seluruh Indonesia menunjukkan pada tahun 2006 terdapat 6.005.781 jiwa penganut agama Buddha, tiga kali lebih banyak dari angka sensus. Agaknya jumlah ini tidak berlebihan, karena jika dibandingkan terhadap jumlah tempat ibadah (4.179 wihara dan

2.966 cetya), terdapat sekitar 840 orang untuk satu tempat ibadah. Sebanyak 6,91 % dari populasi, yaitu 415.452 orang, tercatat sebagai pelajar sekolah tingkat dasar hingga menengah atas. Dari jumlah ini murid SD hanya 34,59%. Apa artinya angka tersebut? Kalau bukan menunjukkan banyak umat Buddha yang belum mendapat pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya, tentu mengindikasikan rendahnya penganutan agama Buddha pada golongan usia muda.

Ada berapa dharmaduta yang memberi pelayanan kepada umat? Dharmaduta terdiri dari anggota Sanggha, pandita, dan upasaka-upasika atau aktivis yang terpanggil untuk mengembangkan agama Buddha. Mereka yang didaftarkan sebagai rohaniwan di Departemen Agama, tercatat hanya ada 602 orang. Tentu saja lebih banyak yang tidak terdaftar. Pada dasarnya dharmaduta

memiliki peran sebagai guru. Tetapi kebanyakan bukan produk sekolah guru atau sekolah agama. Kita mengenal guru formal di sekolah-sekolah, guru nonformal di kursus-kursus, penataran atau pelatihan, dan guru informal di tengah keluarga dan lingkungan. Guru agama di sekolah yang terdaftar sebanyak 2.904 orang (di antaranya 687 orang di sekolah negeri) dengan rasio 1 guru untuk 143 siswa. Ditjen Bimas Buddha memproyeksikan kebutuhan 825 orang guru baru. Tenaga guru ini dihasilkan oleh 9 Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB). Dua STAB di antaranya (Nalanda dan Smaratungga) dalam 5 tahun terakhir hanya menghasilkan 206 orang lulusan S1. Sebagian ada yang sudah bekerja sebagai guru. Lulusan sekolah tinggi agama ini memang banyak yang menjadi guru, tetapi sebagian lain mengisi formasi birokrat dan bekerja di bidang lain. Agaknya di masa depan akan lebih banyak jebolan

STAB yang diperlukan untuk memasuki berbagai bidang keilmuan di luar pendidikan agama.

Yang menjadi pertanyaan, berapa di antaranya yang kemudian menjadi pandita? Di kebanyakan daerah pandita menggantikan peran biksu yang jumlahnya terlalu sedikit. Tetapi jumlah pandita pun belum memenuhi kebutuhan semua tempat ibadah. Merupakan kenyataan bahwa sebagian besar pengurus tempat ibadah dan organisasi Buddhis tidak benar-benar mendalami agama yang dianutnya. Alangkah idealnya jika mereka semua diharuskan untuk mengikuti pendidikan agama. Apakah itu diselenggarakan oleh STAB, pusdiklat, dan lain-lain. Sampai sekarang ini tidak banyak orang yang memilih untuk hidup sebagai biksu/biksuni. Namun perlu dicatat, menurut sejarah, contoh di China dan Myanmar,

saat agama Buddha mencapai puncak kejayaan bukanlah masa ketika populasi biksu paling banyak. Bahkan sebaliknya, sering terjadi ketika populasi biksu menjadi semakin banyak, agama Buddha malah merosot tajam (Zhao Pu Chu, 1990).

Sumber daya sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak pasti dan bisa menipu, kata Rhenald Kasali (2005) dalam bukunya *Change*. Yang ada bisa dianggap tidak ada, dan sebaliknya, yang tidak ada bisa menjadi ada. Orang yang sukses banyak melakukan perubahan secara spektakuler melalui sumber daya yang kata orang-orang lain "tidak ada sama sekali". Sebaliknya, yang bangkrut dimulai dari kondisi yang kelebihan sumber daya. Sumber daya tidak melulu berbentuk *tangibles* (seperti uang, logistik, tempat) melainkan juga *intangibles*, seperti reputasi,

keterampilan, pengetahuan, motivasi, *team spirit*, dan lain-lain.

Memang, manusia merupakan sumber daya yang utama. Tanpa modal manusia semua sumber daya lain tak dapat dimanfaatkan. Istilah sumber daya manusia di sini dipakai tanpa memosisikan manusia sebagai objek atau sasaran eksploitasi. Manusia adalah subjek. Kemajuan peradaban atau pembangunan tidak dimulai dengan barang, tetapi dimulai dengan orang: pendidikannya, organisasinya, dan disiplinnya. Untuk memberdayakan modal manusia, E.F. Schumacher (1973) yang memperkenalkan Ilmu Ekonomi Agama Buddha lewat bukunya *Small is Beautiful* menyatakan bahwa akal budi manusia dipelihara dan dipertajam lewat pendidikan, karena itu dari semua sumber daya, pendidikan adalah yang terpenting. Kemajuan ilmu dan teknologi yang menghasilkan

keterampilan teknis (*know-how*), semakin membutuhkan pendidikan yang menghasilkan kearifan. Maka, tugas pendidikan yang utama adalah menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai, mengenai mau apakah kita dengan hidup kita ini.

Kelihatannya ketertinggalan kita, Indonesia, dari negara tetangga, karena tidak menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. Selama ini Indonesia lebih mementingkan pembangunan di bidang ekonomi dan politik. Di kalangan Buddhis sendiri, ketimbang mendirikan sekolah lebih banyak yang masih mengutamakan pembangunan vihara yang mewah.

Proses belajar dan mengajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beragama Buddha. Komunitas Buddhis seharusnya adalah masyarakat pembelajar. Sebagaimana sabda Buddha

kepada Yasa, "Ke sini Yasa, Aku akan mengajarmu." (Vin. I, 15). Buddha sering diposisikan sebagai seorang guru. Karena itu setiap pengikut Buddha sepantasnya terpanggil untuk berbuat sesuatu lewat pendidikan. Kedua golongan umat yaitu anggota Sanggaha dan para perumah tangga dapat memanfaatkan kesempatan sesuai dengan cara hidupnya masing-masing untuk saling menopang dan mengembangkan pendidikan Buddhis. Sayang sekali banyak umat yang kurang peduli pada pendidikan Buddhis. Orang tua tidak membekali anaknya dengan pendidikan agama Buddha dari rumah. Mereka mengeluh tentang anaknya yang alih-agama lewat sekolah. Lalu siapa yang harus mengatasi masalah ini kalau bukan komunitas umat itu sendiri? Pepatah Tionghoa mengatakan: *"If you want one year of prosperity, grow grain. If you want ten years*

of prosperity, grow trees. If you want hundred years of prosperity, grow people."

Sumber Daya Sosial

Danah Zohar & Ian Marshall (2004) menghubungkan tiga jenis modal: modal materiil, modal sosial, dan modal spiritual dengan kecerdasan rasional, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Modal materiil maksudnya uang dan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang yang diperoleh dengan kecerdasan rasional. Modal sosial adalah sumber daya sosial, kemampuan orang untuk bekerja bersama yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama, yang dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Modal spiritual adalah kekayaan yang diperoleh dari makna dan nilai terdalam, tujuan paling fundamental dan motivasi

tertinggi yang mengintegrasikannya dalam hidup dan kerja kita.

Apa yang disebut modal sosial dibutuhkan dalam pembangunan berbasis komunitas (*community based development*). Konsep *community based development* bersifat *bottom-up*, yaitu komunitas sendiri yang berinisiatif. Beda dengan *community development* yang bersifat *top-down*. Komunitas Buddhis tentu saja ada di tengah komunitas bangsa yang majemuk dengan permasalahan yang sama, namun juga memiliki persoalan sendiri yang unik. Modal sosial diukur bukan dari nilai materiil belaka, melainkan menyangkut kualitas hidup dalam sebuah masyarakat, yang bagi seorang Buddhis misalnya ditandai ketersediaan lapangan pekerjaan sesuai dengan mata pencaharian yang benar, yang tidak melanggar sila, tidak ada diskriminasi, ada

jaminan keamanan dan ketaatan pada hukum, kebebasan beragama dan beribadah, toleransi.

Berdasarkan objek penelitian dan lokasi penelitian, ada yang memandang modal sosial itu sebagai sebuah kepercayaan (*social trust*), ada yang melihatnya sebagai norma yang berhubungan dengan tingkah laku (*social norms*), yang lainnya memahaminya sebagai jaringan sosial (*social networks*). Sementara yang lain menyimpulkan bahwa modal sosial meliputi gabungan ketiganya (Dasgupta dan Saragildin, 1999). Semua ini merupakan nilai yang dapat memfasilitasi koordinasi dan kerjasama di tengah komunitas untuk memperoleh keuntungan bersama. Manfaat secara materiil dan sekaligus keuntungan sosial yang tercapai akan menghasilkan kerekatan di antara anggota, dan

kondisi inilah yang dapat memajukan komunitas.

Modal sosial terdiri dari komponen: 1) institusi sosial (*social institution*), 2) pola kebudayaan (*culture patterns*), 3) bentuk komunikasi (*models of communications*), dan asosiasi antar-individu dan antar-organisasi, 4) karakteristik psikososial suatu komunitas (Alex Inkeles, 2000). Institusi sosial merupakan modal kelembagaan yang diperlukan dalam mereproduksi dan memelihara setiap anggota masyarakat, serta menjadi dasar yang penting bagi berlangsungnya fungsi masyarakat secara efektif. Institusi sosial itu di antaranya keluarga, sistem pendidikan, sistem pelayanan sosial atau kesejahteraan, dan sebagainya.

Ketika kita membangun dan mengembangkan sebuah institusi, perlu diingat bahwa cita-cita

memberi sumbangan, melayani dan memuaskan orang yang bukan anggotanya menjadi ciri lembaga agama dan organisasi sosial. Seperti halnya sekolah didirikan terutama untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan guru. Rumah sakit didirikan terutama untuk kepentingan pasien yang ingin segera sembuh, bukan untuk kepentingan para dokter dan perawat. Pelaku ekonomi yang baik pun menyadari bahwa perusahaan ada untuk mengadakan barang dan jasa bagi pelanggan, bukan terutama untuk memberi pekerjaan kepada karyawan dan manajer, bahkan bukan untuk menghasilkan dividen kepada pemegang saham. (Peter F. Drucker, 1974).

Hal ini dikemukakan, mengingat ada kesan bahwa banyak pemimpin agama Buddha yang berperilaku sebagai pedagang. Majelis ataupun wihara

diposisikan sebagai toko, yang menjual komoditi dengan label cap eksklusif, kira-kira seperti kecap nomor satu. Umat Buddha yang jumlahnya tidak banyak itu diperebutkan, bagai pelanggan yang diperebutkan oleh toko-toko sejenis. Dapat dimengerti, wihara baru yang letaknya berdekatan dengan wihara lain dipandang sebagai saingan. Sesama biksu, pandita, atau dharmaduta lain tidak saling mendukung, bahkan tidak jarang yang bermusuhan. Lembaga atau organisasi keagamaan Buddha yang satu memandang sesamanya yang lain sebagai lawan, sehingga kerjasama menjadi sesuatu yang mustahil. Sikap sektarian seringkali berhubungan dengan dorongan keakuan yang mengutamakan kepentingan individu dan golongan.

Sebuah komunitas akan berkembang jika melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1)

Kesepakatan kebijakan dan pola; (2) Keterbukaan, sedia membantu dan dibantu; (3) Hubungan, dalam hal frekuensi, mutualis, dan kebinekaan; (4) Kemudahan dan kedekatan mengenai waktu, tempat, dan kontak; (5) Kapasitas berupa sumber daya, pendidikan, pengalaman; (6) Struktur dengan kejelasan siapa bertanggungjawab atas apa; (7) Koordinasi, baik internal atau eksternal; (8) Sinergis; (9) Sistem penghargaan. Apa yang disebut Persamuhan Umat Buddha merupakan komunitas terkecil yang memiliki kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dan mendayagunakan potensi lokal dengan sebaik-baiknya. Pusat penelitian dan pengembangan dari majelis agama di tingkat nasional atau provinsi dapat memfasilitasi.

Setiap bentuk kerjasama tentu saja membutuhkan kerukunan. Untuk memelihara kerukunan,

Buddha memberi petunjuk berupa "Enam Faktor yang Membawa Keharmonisan" (*Saraniya-dhamma*). Keenam faktor itu adalah: (1) cinta kasih diwujudkan dalam perbuatan; (2) cinta kasih diwujudkan dalam tutur kata; (3) cinta kasih diwujudkan dalam pikiran dan pemikiran, dengan memiliki iktikad baik terhadap orang lain; (4) memberi kesempatan kepada sesamanya untuk ikut menikmati apa yang diperoleh secara halal; (5) di depan umum atau pun pribadi orang menjalankan kehidupan bermoral, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain; (6) di depan umum atau pun pribadi, memiliki pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan (A. III, 288-289). Pada hakikatnya dengan melindungi diri sendiri

seseorang itu melindungi orang lain, dengan melindungi orang lain seseorang melindungi dirinya sendiri (S. V, 169).

Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan salah satu tema manajemen yang dominan. Dalam komunitas atau organisasi yang menerapkan pemberdayaan anggota, setiap individu memiliki peran yang penting, apakah itu kewenangan, tanggungjawab, dan fleksibilitas memastikan tercapainya hasil yang berkualitas tinggi. Seluruh kegiatan manajemen sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Pemberdayaan bukan sekadar pemberian otoritas, tetapi juga berarti memberi pengetahuan dan keterampilan yang menjamin kualitas dari kemampuan dan sikap personal. Sehubungan

dengan peran dharmaduta, tanpa pemberdayaan, atau karena pelatihan yang buruk dan rendahnya motivasi serta mungkin juga tidak adanya insentif, akan terjadi kemerosotan seiring dengan sikap dan pola pikir yang negatif.

Kemauan untuk mengadakan pemberdayaan dan kemampuan individu untuk diberdayakan harus dilakukan secara paralel dan berkesinambungan. Karena itu pemberdayaan yang berhasil harus dirancang melalui banyak proses, seperti rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan dalam sistem yang memadai. Istilah pendidikan digunakan dalam pengertian membangun konsep sedang pelatihan merupakan upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan keterampilan. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Buddha bukanlah sekadar mempengaruhi orang lain dan

membuatnya tunduk, tetapi adalah bagaimana membuat seseorang meningkatkan kualitas dirinya sehingga mampu untuk tidak bersandar pada pihak lain (apalagi menjadi tergantung pada si pemimpin).

Secara struktural pemberdayaan diartikan sebagai pengelolaan sumber daya manusia yang mampu mengefektifkan kepemimpinan. Fungsi yang harus dilakukan terus-menerus adalah komunikasi, memupuk saling pengertian. Dan fungsi yang dilakukan secara bertahap: 1) perencanaan menyangkut kebutuhan tenaga dalam segala tingkatan; 2) pengorganisasian dan tatalaksana, memilih orang yang berkompeten, orientasi, latihan dan mengembangkan (menyangkut pula sumber daya logistik dan pendanaan); 3) penggerakan secara terarah, berupa penempatan,

pendelegasian, memotivasi, koordinasi, mengatasi perbedaan, mengatasi perubahan; 4) pengendalian dan evaluasi, yang tentunya harus didukung oleh sistem informasi dengan pendataan dan pelaporan yang akurat, standar kerja, pengukuran hasil kerja, tindakan perbaikan, dan penghargaan.

Secara personal pemberdayaan diharapkan membuat seorang dharmaduta dapat dihargai dan berpengaruh karena memiliki kepandaian dan karakter. Dia tidak hanya kompeten, terampil atau mampu melaksanakan tugasnya, tetapi juga memiliki karakternya yang baik, jujur, etis, bertanggungjawab. Seorang dharmaduta tidak hanya berkhotbah, tetapi perbuatan dan pekerjaan mereka sudah menjadi pesan, karena mereka menjadi contoh teladan. Membimbing dengan menjadikan dirinya pekerja di antara pekerja, atau

umat di antara umat. Ini model kepemimpinan yang mengangkat dan memberdayakan para pengikutnya.

Setiap dharmaduta harus memiliki sekurang-kurangnya tiga kompetensi. Pertama kompetensi personal, yang merupakan kepatutan sebagai panutan karena ia sendiri menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Kedua, kompetensi profesional dengan memiliki kemampuan yang memadai. Ketiga, kompetensi sosial, artinya peduli terhadap hidup kemasyarakatan dan lingkungan di sekelilingnya. "Hendaknya orang menempatkan dirinya sendiri terlebih dahulu dalam hal-hal yang patut dan selanjutnya melatih orang-orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tidak akan tercela" (Dhp. 158). Untuk mengaktualisasi kompetensi yang dimilikinya dharmaduta harus terus-menerus

belajar dan berlatih, dengan akses memanfaatkan sumber belajar yang seluas-luasnya.

Penutup

Pemelukan agama yang diwariskan dalam bentuk tradisi cenderung membuat agama diterima apa adanya secara pasif dan statis. Nilai-nilai agama yang dianut lewat pewarisan tersebut mudah dipahami secara keliru sehingga kurang memberi arti bagi kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan membuat dharmaduta dapat berperan secara dinamis dan kontekstual yang relevan mengikuti perubahan dan perkembangan berbagai ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan lain-lain. Sebagaimana kata Charles Darwin, "Bukan yang terkuat yang mampu berumur panjang, melainkan yang paling adaptif," agama Buddha juga akan bertahan dan semakin

berkembang dengan merespons perubahan.

Umat Buddha memang ditandai heterogenitas. Fragmentasi pandangan dan sikap sektarian yang sempit sangat potensial menyebabkan krisis makna atau krisis nilai. Pada zaman Buddha Gotama saja sudah terdapat dua macam orang yang keliru, yaitu ia yang menyatakan apa yang tidak pernah dikatakan oleh Tathagata sebagai sabda Tathagata, dan ia yang mengingkari apa yang telah disabdakan oleh Tathagata (A. I, 59). Karena itu kita diberi petunjuk untuk menguji, apakah sesuai dengan Sutta dan Winaya (D. II, 123-125). Bagaimana memahami keanekaragaman mazhab dan adaptasi kultural sebagai bagian integral dari satu kendaraan Buddha, menghendaki penelusuran referensi yang bersumber dari Kitab Suci. Buddha menganjurkan penganut-Nya

untuk berkelompok mempelajari kebenaran bersama, tidak mempertengkarkannya, melainkan secara cermat memperbandingkan makna demi makna, kalimat demi kalimat, demi kebaikan orang banyak (*D. III, 127*). "Sebagaimana halnya dengan samudra raya yang hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa garam, demikian pula Dharma hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa kebebasan" (*Ud. 56*).

Apa yang saya kemukakan ini mudah-mudahan dapat memberi inspirasi dan membangkitkan motivasi. Menyadari bahwa jumlah umat Buddha di Indonesia tidak banyak, seharusnya kita melihat lebih besarnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas. Kemajuan komunitas Buddhis akan memberi kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Dukung Dian Dharma

Ketika Anda memberi donasi kepada Penerbit Dian Dharma—baik untuk menghadirkan buku baru, cetak ulang, maupun pengembangan—Anda menjadi bagian dari sesuatu yang benar-benar istimewa. Kepedulian dan kemurahan hati Anda membantu menciptakan lebih banyak buku dan e-book yang mendukung studi dan praktik Dharma.

Sebagai penerbit nirlaba, setiap rupiah yang kami terima digunakan untuk menjalankan misi kami, yaitu agar Dharma dapat menjangkau mereka yang mencarinya. Mereka yang mendapatkan pemahaman Dharma yang komprehensif melalui membaca banyak buku, akan dapat menjadi duta-duta Dharma di seluruh pelosok tanah air.

Terima kasih atas dukungan Anda yang tak ternilai harganya!

Penerbit Dian Dharma
WA 0811504104

Untuk menyatukan kepentingan berbagai kelompok tentu perlu kesepakatan-kesepakatan yang kompromistis dan pragmatis tanpa menyimpang dari kebenaran.

Demokrasi dan Agama Buddha Di Indonesia

Buddhayana menolak sikap sektarian, yang tidak memiliki toleransi terhadap ajaran dan praktik dari berbagai aliran di dalam agama Buddha selain dari aliran sendiri.

Buddhayana, Tinjauan Skolastik

Seorang dharmaduta tidak hanya berkhotbah, tetapi perbuatan dan pekerjaan mereka sudah menjadi pesan, karena mereka menjadi contoh teladan.

Pemberdayaan Dharmaduta Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas



KARANIYA

